

**OTONOMI DAERAH SEBAGAI KEMAJUAN EKONOMI MASYARAKAT
INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN LEMBATA**



SKRIPSI

*Di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana
Pendidikan pada program Studi Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh
Siti Syamsia
10538281713**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

September 2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar * Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Siti Syamsia, NIM 10538281713 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 1079 Tahun 1439 H/2017 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2017.

26 Muharram 1439 H

Makassar, _____

26 Oktober 2017 M

Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM

Ketua : Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Khaeruddin, M.Pd.

Penguji :

1. Dr. H. Muhsin Madani, M.Si

2. Dr. Abd. Azis Muslimin, M.Pd

3. Dr. Khaeruddin, M.Pd

4. Dr. Hj. Rullyaty, MM

Mengetahui

Dekan FKIP
 Universitas Muhammadiyah Makassar



Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
 NBM: 860 933

Ketua Prodi
 Pendidikan Sosiologi



Dr. H. Nursalam, M.Si.
 NBM: 951 829



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar * Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Otonomi Daerah sebagai Kemajuan Ekonomi Masyarakat
Industri Kecil di Kabupaten Lembata.

Nama : Siti Syamsia

NIM : 10538281713

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk
dipertanggung jawabkan di depan tim pengaji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 14 Oktober 2017

Disahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Hj. Sa'ribulan, K, M.Pd.

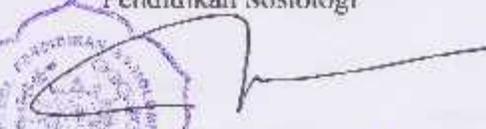

Dr. Hj. Ruliaty, MM.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Jurusan
Pendidikan Sosiologi


Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM: 860.937


Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM: 951 829



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Syamsia
NIM : 10538281713
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Judul Skripsi : **Otonomi Daerah Sebagai Kemajuan Ekonomi Masyarakat Industri Kecil di Kabupaten Lembata**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, September 2017
Yang Membuat Pernyataan

Siti Syamsia



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Siti Syamsia**

NIM : 10538281713

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Judul Skripsi : **Otonomi Daerah Sebagai Kemajuan Ekonomi Masyarakat Industri Kecil di Kabupaten Lembata**

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam menyusun skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas..
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar ,September 2017

Yang membuat perjanjian

Siti Syamsia

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M.Si
NBM.951 829

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Yakin, Ikhlas dan Istiqomah

Berangkat dengan penuh keyakinan

Berjalan dengan penuh keikhlasan

Dan Istiqomah dalam menghadapi cobaan.

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S. Al Insyirah :6-8)

“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan, dan saya percaya pada diri saya sendiri

“Allah lebih mencintai orang-orang yang berilmu

Al-qur’an adalah sumber ilmu pengetahuan

Berusaha dan berdoa adalah kunci kesuksesan”

Skripsi ini saya persembahkan buat

Kedua Orang Tuaku yang senantiasa memberikan dukungan dan doa, Kakak dan Adikku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan dan doanya buat aku.

Sahabat-sahabatku terkasih yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku.

ABSTRAK

Siti Syamsia, 2017, Otonomi Daerah Sebagai Kemajuan Ekonomi Masyarakat Industri Kecil di Kabupaten Lembata. Skripsi. Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing 1.Hj. Syahribulan K dan pembimbing 2. Hj. Ruliaty

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup agar menjadi sejahtera, masyarakat yang mempunyai kemampuan dan jeli melihat potensi diri serta mampu mengidentifikasi lingkungan, dapat menemukan peluang dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu diantaranya dengan melakukan usaha kecil menengah.

Usaha kecil menengah (UKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Peran penting tersebut telah mendorong Kabupaten Lembata untuk terus berupaya meningkatkan daya saing UKM dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Desain penelitian kualitatif deskriptif digunakan agar dapat memberikan naratif deskripsi berkaitan dengan Otonomi daerah sebagai kemajuan ekonomi di Kabupaten Lembata. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan analisis data yang digunakan mulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Otonomi daerah sebagai kemajuan ekonomi masyarakat industri kecil di Kabupaten Lembata mengalami perkembangan yang positif baik dari jumlah UKM yang bertambah atau pendapatan masyarakat yang menjadi lebih baik.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Industri kecil

KATA PENGANTAR



Allah SWT Maha Penyayang dan Maha Pengasih ,demikian kata untuk mewakili atas segala karunia dan nikmat-Nya. Jiwa ini takkan berhenti bertahmid atas anugerah pada detik waktu,denyut jantung,gerak langkah,serta rasa dan rasio pada-Mu Sang Khalis kerahkalik. Srikpsi ini adalah setitik dari sederatan berkah-Mu.

Setiap orang dalam berkarya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang.Kesempurnaan bagaikan fatamorgana yang semakin di kejar semakin menghilang dari pandangan,bagai pelangi yang terlihat indah dari kejauhan, tetapi menghilang jika di dekati.Demikian juga tulisan ini,kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan,tetapi kapasistas penulis dalam keterbatasan. Segala daya upaya telah penulis kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam perampungan tulisan ini. Segala hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Muhammad Ikram Jafar dan Ibunda Siti Habibah Ratuloly yang telah berjuang, berdo'a, mengasuh dan membesarkan serta mendidik, dan membiayai penulis dalam proses pencarian Ilmu. Demikian pula penulis mengucapkan kepada keluarga yang tak hentinya memberikan motivasi dan selalu menemaniku dengan candanya, kepada Dra. Hj. Syahribulan K , M.Pd. dan Dr. Hj. Ruliaty, M.M. sebagai pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan,arahan serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. H. Abd.Rahman Rahim,SE,MM Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib,M.Pd.,Ph.D Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dr. H. Nursalam, M.Si, ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi, dan Dr. Muhammad Akhir, M.Pd, sekeretaris jurusan Pendidikan Sosiologi serta seluruh dosen dan para staf pegawai dan lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku yang selalu menemaniku dalam suka dan duka, sahabat-sahabatku terkasih serta seluruh rekan mahasiswa Jurusan Pendidikan Sosiologi atas segala kebersamaan, motivasi, saran, dan bantuannya kepada penulis.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak, selama saran dan kritikan tersebut sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amin.

Makassar , September 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERJANJIAN.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Defenisi Operasional	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEP

A. Kajian Pustaka.....	12
1. Penelitian Terdahulu	12

2. Pengertian Otonomi Daerah	13
3. Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah.....	17
4. Dampak Otonomi Daerah.....	20
5. Industri Kecil.....	22
6. Ciri-ciri Industri Kecil	28
7. Jenis-jenis Industri Kecil.....	29
8. Faktor yang mempengaruhi Industri Kecil	29
9. Lokasi Industri Kecil.....	30
10. Teori-teori Sosiologi yang Relevan	30
B. Kerangka Konsep	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Informan Penelitian	32
D. Fokus Penelitian	33
E. Instrumen Penelitian	33
F. Jenis Dan Sumber Data.....	33
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Teknik Analisis Data.....	35

I. Teknik keabsahan data.....	36
J. Jadwal Penelitian	36

BAB IV GAMBAR DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Lembata.....	37
B. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	39
C. Sistem Kebudayaan Masyarakat Lembata.....	49
D. Visi dan Misi Kabupaten Lembata.....	51

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	53
B. Pembahasan.....	62

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

1.1Daftar Tabel

2.1 Jadwal Penelitian.....	36
2.2JumlahPendudukKabupatenLembata.....	42
2.4 Kepadatan Penduduk Kabupaten Lembata.....	44
2.5 Daftar Usaha Mikro Kecil danMenengah	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Kedua Undang-Undang tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi daerah, karena terjadinya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan yang selama ini merupakan tanggung jawab pemerintah Pusat.

Krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah memporak-porandakan hampir seluruh sendi-sendi ekonomi dan politik negeri ini yang telah dibangun cukup lama. Lebih jauh lagi, krisis ekonomi dan politik, yang berlanjut menjadi multikrisis, telah mengakibatkan semakin rendahnya tingkat kemampuan dan kapasitas negara dalam menjamin kesinambungan pembangunan. Krisis tersebut salah satunya diakibatkan oleh sistem manajemen negara dan pemerintahan yang sentralistik, di mana kewenangan dan pengelolaan segala sektor pembangunan berada dalam kewenangan pemerintah pusat, sementara daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerahnya

Indonesia telah menikmati masa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang, hingga datangnya krisis nilai tukar tereskalasi menjadi krisis multi dimensi yang dimulai akhir tahun 1997. (Tejasari, 2008). Ketika terjadi krisis ekonomi 1997, hanya sektor UKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Krisis ini telah mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar satu persatu pailit karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dollar yang menurun dan berfluktuasi. Sektor perbankan yang ikut terpuruk turut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi. Berbeda dengan UKM yang sebagian besar tetap bertahan, bahkan cenderung bertambah. (Dapertemen Koperasi, 2008)

Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu, UKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan bukti ini, jelas bahwa UKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kekompetitifan pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada. Adapun alasan-alasan UKM dapat bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis yaitu karena yang pertama ; sebagian besar UKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah. Kedua ; sebagian besar UKM mempergunakan modal sendiri dan tidak mendapat modal lain dari bank. Implikasinya pada masa krisis keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidak berpengaruh terhadap UKM. Ketiga ; dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerjanya. Sehingga para penganggur tersebut memasuki sektor informal dengan melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil, akibatnya jumlah UKM meningkat (Partomo dan Soejodono, 2004)

Di Indonesia harapan untuk membangkitkan ekonomi rakyat sering kita dengarkan karena pengalaman ketika krisis multidimensi tahun 1997-1998 usaha kecil telah terbukti mampu mempertahankan kelangsungan usahanya, bahkan memainkan fungsi penyelamatan di beberapa sub sektor kegiatan. Fungsi penyelamatan ini segera terlihat pada sektor-sektor penyediaan kebutuhan pokok rakyat melalui produksi dan normalisasi distribusi. Bukti tersebut paling tidak telah

menumbuhkan optimisme baru bagi sebagian besar orang yang menguasai sebagian kecil sumberdaya akan kemampuannya untuk menjadi motor pertumbuhan bagi pemulihan ekonomi.

Dalam penelitian Van Gils (2007) dalam Aylin Ates dan Umit Bititci (2008) menyatakan bahwa UKM adalah mesin penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari : (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Posisi penting ini sejak dilanda krisis belum semuanya berhasil dipertahankan sehingga pemulihan ekonomi belum optimal.

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Serta mampu menyerap banyak tenaga kerja. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahap pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Departemen Koperasi dan UKM. (Kuncoro, 2002).

Beberapa penyebab laju pertumbuhan ekonomi membaik tetapi tidak memperbaiki peningkatan kesempatan kerja adalah ; pertama, sumber perbaikan

pertumbuhan ekonomi umumnya berasal dari konsumsi masyarakat dan pemerintah, bukan berasal dari peningkatan kapasitas perekonomian. Kedua, kebijakan politik berasal dari probisnis menjadi proburuh. Hal ini mengakibatkan pasar tenaga kerja menjadi rigit dan menyebabkan peningkatan biaya tenaga kerja relative terhadap faktor produksi lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dimasa mendatang adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja, yang menyebabkan peningkatan rasio upah terhadap biaya produksi lainnya meningkat. (Ikhsan, 2004).

Realisasi otonomi daerah mulai berlaku sejak di lahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, lalu disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakomodasi aspirasi rakyat, sehingga lebih terjaminnya pelaksanaan demokrasi di daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan sehingga mampu mengejar ketertinggalan dengan daerah lain di Indonesia.

Dalam aplikasi otonomi daerah ternyata sangat jauh dari yang diharapkan dimana hampir setiap kebijakan pemerintah daerah tidak banyak berorientasi masyarakat kecil, bahkan unit usaha yang di kelola oleh rakyat kecil saat ini terpaksa

tidak memperoleh kesempatan untuk di bina secara baik oleh dinas perindustrian dan perdagangan karena berbagai persoalan.

Seharusnya determinasi desentralisasi dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan di daerah akan lebih mandiri atau dengan kata lain konsep pembangunan diarahkan secara bottom up dari pada top down (maksudnya masyarakat daerah lebih kreatif melaksanakan kebijaksanaan pembangunannya sendiri), mampu mengelola kekayaan sendiri, dan juga dapat mengenal masalahnya sendiri dengan begitu akan terjadi percepatan pelaksanaan pembangunan di daerah. Keterlibatan semua elemen masyarakat menjadi hal yang urgen sehingga semangat otonomi daerah dapat dirasakan dan dinikmati oleh semua pihak.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembangunan industry kecil diarahkan untuk menumbuh kembangkan kembali ekonomi rakyat terutama untuk kegiatan ekonomi dengan skala kecil, serta meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat secara produktif. Industri yang termasuk dalam skala kecil meliputi usaha skala rumah tangga, bahkan terdapat di desa-desa yang biasanya berbasis pada budaya lokal. Upaya ini biasa dilakukan dengan modal pelatihan, pembinaan, penyuluhan, pendampingan, bimbingan, bantuan promosi, maupun kemitraan. Usaha untuk mempercepat proses pembangunan, pemerataan beban pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan, masalah tenaga kerja dan penyediaan laporan kerja merupakan masalah yang segera mendapatkan perhatian secara serius. Di lihat dari sumber daya manusia, penduduk desa merupakan sumber potensi tenaga kerja yang perlu diperhatikan dan dapat melibatkan diri dalam

pembangunan. Usaha meningkatkan pengetahuan keterampilan di desa di arahkan pada terbentuknya lapangan kerja sesuai dengan sektor pembangunan di pedesaan yang meliputi industri, pertanian, dan peternakan sehingga hasilnya dapat dirasakan.

Potensi masyarakat perlu dikembangkan melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, keterampilan serta ketahanan mental spiritual agar lebih dapat memanfaatkan kesempatan berperan aktif di segala kehidupan bangsa dan segenap kegiatan pembangunan termasuk dalam proses pengambilan keputusan serta mampu menghadapi perubahan-perubahan dalam masyarakat dan dalam lingkungan keluarga yang selaras,serasi dan seimbang.

Masyarakat yang menekuni industri rumah tangga umumnya menghadapi berbagai kendala yang memerlukan penanganan baik dari masyarakat maupun pemerintah, seperti pendidikan dan latihan keterampilan,permodalan,bahan baku,proses produksi,pemasaran, pemberian fasilitas dan perlindungan serta bimbingan dan penyuluhan.

Meskipun saat ini telah dipersiapkan komponen program peningkatan ketahanan ekonomi rakyat yang sasarannya adalah kelompok pelaku indutri kecil, dimana komponen program ini merupakan program yang secara khusus bertujuan menanggulangi dampak krisis serta mencegah lebih jauh dampak yang lebih buruk akibat krisis yang berpanjangan.Namun demikian kegiatan ini perlu dipahami sebagai suatu kebijaksanaan jangka pendek (crash program) yang mempunyai kaitan kedepan dalam rangka pengembangan kapasitas lebih lanjut, sehingga program ini perlu

dipahami sebagai sebuah simultan untuk mendorong produktivitas dan kesinambungan pelaksanaan serta pelestarian hasilnya.

Program peningkatan ketahanan ekonomi rakyat diutamakan bagi para pelaku kegiatan ekonomi produktif rakyat di sektor pertanian rakyat, kerajinan rakyat dan industri kecil, serta jasa dan perdagangan kecil, terutama yang berada di daerah pedesaan. Dengan program ini diharapkan kegiatan ekonomi rakyat yang akhir-akhir ini mengalami kelesuan dapat bangkit kembali. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, program yang telah dicanangkan tersebut belum menjangkau secara keseluruhan semua lapisan masyarakat, untuk itu keterlibatan semua pihak dalam menangani permasalahan ini sangat diharapkan.

Menyadari peran startegis usaha kecil dan adanya kebijaksanaan di bidang ekonomi yakni perhatian yang lebih serius terhadap keberadaan, kelangsungan hidup dan pengembangan industri kecil yang esensinya lazim dikenal dengan ekonomi kerakyatan, maka perlu dilakukan peninjauan kelokasi terhadap industri rumah tangga.

Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Lembata, masyarakat memiliki kultur dan etos kerja yang sangat rendah, hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan sikap malas bekerja sehingga kehidupan perekonomian mereka juga pas-pasan. Sementara kondisi usaha yang dibangun sebatas usaha rumah tangga dengan berkonsentrasi pada skala lokal.

Kabupaten Lembata merupakan sebuah pulau kecil dalam gugusan pulau-pulau di perairan sekitar kabupaten flores timur, propinsi NTT, meskipun sudah sejak tahun 1954 masyarakat lembata berjuang untuk mendapatkan otonomi pemerintahan, namun baru pada 14 oktober 1999 lalu Lembata resmi menjadi kabupaten baru ,terpisah dari kabupaten flores timur. Sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki kewenangan luas untuk mengelola, merencanakan dan memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal. Kabupaten Lembata yang terbentuk pada awal bergulirnya masa reformasi mestinya turut menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang desentralis dengan pola pendekatan bottom up. Namun bergulirnya proyek- proyek infrastruktur berskala besar dari pusat di awal tahun otonomi kabupaten sangat mempengaruhi perjalanan sistem dan strategi pembangunan Lembata selanjutnya. Di tahun awal pembangunan infrastruktur, wajah Lembata mengalami perubahan yang signifikan. Peningkatan kapasitas jalan, pembukaan jalan-jalan baru ke daerah terisolir, pembukaan jaringan pipa air minum serta pembangunan jaringan listrik menjadi catatan kemajuan di awal-awal tahun otonomi kabupaten Lembata. Di tahun-tahun selanjutnya, kemajuan-kemajuan ini ternyata mengalami hambatan dalam perkembangannya untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Konsentrasi pemerintah daerah untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur yang di tempuh melalui pengerjaan proyek-proyek yang cenderung berskala telah menempatkan pemerintah daerah sebagai agen tunggal pembangunan dalam korporasinya dengan pengusaha dan pemilik modal. Fungsi

masyarakat diminisialisir sebatas mendukung usaha pembangunan yang dijalankan pemerintah. Akibatnya, pembangunan kemudian berjalan di luar kontrol kepentingan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi ekonomi di kabupaten Lembata setelah otonomi daerah ?
2. Apakah otonomi daerah berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat industri kecil di kabupaten Lembata ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui kondisi ekonomi di kabupaten Lembata setelah otonomi daerah.
2. Untuk Mengetahui apakah otonomi daerah berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat industri kecil di kabupaten Lembata.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa tentang masalah otonomi daerah dan ekonomi industri kecil.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang otonomi daerah dan ekonomi industri kecil.

E. Defenisi Operasional

Defenisi operasional digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul proposal penulis. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Otonomi daerah ialah hak,wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ekonomi masyarakat industri ialah Suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat, karena dengan semakin meningkatnya usaha ekonomi produktif maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi.
3. Industri kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki,dikuasai,atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Marselinus miku Boli (2010) dengan judul “ Dampak Otonomi Daerah Terhadap Masyarakat Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Lembata. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marselinus menekankan pada dampak otonomi daerah dan bagaimana upaya pemerintah dalam menggerakkan industri kecil dan menengah di kabupaten Lembata. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, dan dalam penelitiannya ia menjeaskan Dampak otonomi daerah khususnya di kabupaten Lembata cukup kondusif dalam memberikan ruang kepada industri kecil dan menengah dalam menghadapi persaingan bebas, usaha kecil dan menengah dinilai jauh lebih siap dilihat dari segi kemampuan SDM, skala usaha dan kemampuannya untuk melakukan inovasi dan akses pasar, sedangkan upaya pemerintah daerah otonom dalam mengembangkan industri kecil dan menengah dengan cara maksimal melaksanakan UU usaha kecil No.9 tahun 1995 dan UU persaingan usaha Tahun 1999 sebagai proteksi yang dilakukan pemerintah RI terhadap pengembangan UKM.

2. Pengertian Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah kabupaten dan kota. Sesuai dengan Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh. Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

Paradigma otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 dimaksud menyangkut asas-asas penyelenggaraan pemerintah di daerah, pembagian wilayah, kewenangan daerah otonomi, prinsip otonomi daerah, susunan pemerintah daerah, mekanisme pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pertanggungjawaban Kepala Daerah, mekanisme pengawasan, prosedur penyusunan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta penyatuan pengaturan pemerintah desa dan kelurahan dengan pemerintah daerah. Ketentuan tersebut diatas diharapkan agar setiap daerah yang melaksanakan otonomi daerah memiliki seperangkat aturan yang mengatur serta menjelaskan dan mengarahkan dalam menjalankan pembangunan di daerahnya artinya setiap pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu memperhatikan dan diawasi oleh ketentuan hukum.

Jika diamati, prinsip otonomi daerah yang dianut oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut lebih mendekati makna dan hakekat otonomi sebagaimana pesan yang termaktub dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 adalah bahwa penyelenggaraan pemerintah di daerah harus dilakukan berdasarkan asas desentralisasi dan tidak mengatur mengenai pemerintahan wilayah yang merupakan manifestasi dari asas dekonsentrasi.

Disisi lain sistem otonomi formal mempunyai ketentuan pada pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : ‘Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang Pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan bidang lainnya’’. Sementara sistem rumah tangga riil diatur dalam ketentuan pasal (9) ayat (2) yang menyatakan bahwa : ‘‘kewenangan propinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah Kabupaten dan daerah Kota’’.

Disamping itu dalam pengaturan keuangan daerah maka pada pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa : sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dan perimbangan
3. Pinjaman daerah dan

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dengan ketentuan diatas maka pendapatan asli daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan dana perimbangan terdiri atas bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan hak atas tanah dan Bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, dapat dimengerti bahwa kewenangan daerah dalam melaksanakan rumah tangganya hanya diperbolehkan untuk mengatur kekayaan yang bersifat material, seperti pendapatan daerah, pinjaman daerah dan pendapatan lain yang sah dan yang menjadi aset lokal artinya kebebasan yang diberikan tidak berarti daerah dapat melakukan apa saja dan menghalalkan segala cara dalam mengejar ketertinggalannya, akan tetapi Pemerintah Daerah diharapkan agar memberdayakan potensi daerahnya untuk melaksanakan pembangunan fisik maupun non fisik sesuai ketentuan yang berlaku. Atau dengan kata lain pemerintah pusat tetap melaksanakan tugasnya sebagai pengawas, baik dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat internal maupun eksternal, ketentuan sistem pengawasan dimaksudkan untuk menentukan kemandirian satuan otonomi. Untuk menghindari agar pengawasan tidak melemahkan otonomi, maka sistem pengawasan ditentukan secara spesifik, baik lingkup maupun tata cara pelaksanaannya. Karena itu, hal-hal seperti memberlakukan prinsip

“pengawasan umum” pada satuan otonomi dapat mempengaruhi dan membatasi kemandirian daerah.

Dengan demikian maka setiap daerah otonom baik dari tingkat Propinsi, Kabupaten, Kota sampai ke Desa dalam melaksanakan kebijaksanaan daerahnya diharapkan dengan kemandirian dan kemampuan yang dimilikinya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya diharapkan mampu menyelenggarakan Pemerintah yang selaras dan seimbang serta dapat memberikan kesejukan, kenyamanan, dan ketentraman serta mencapai derajat kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sebaliknya diharapkan agar menghindari konsep pembangunan yang mengarah kepada penghisapan dan upeti dari masyarakat setempat yang pada gilirannya akan melahirkan antipati, sentiment bahkan dapat melahirkan konflik baik bersifat vertical maupun horizontal.

3. Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan

otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberipelayanan, peningkatanperanserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya pertimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Otonomi Luas

Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan

pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

b. Prinsip Otonomi Nyata

Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

c. Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Dampak Positif Dan Negatif Otonomi Daerah adalah sebagai berikut :

a. Dampak Positif

Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih meneliti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat. Contoh di Maluku dan Papua program beras miskin yang dicanangkan pemerintah pusat tidak begitu efektif, hal tersebut karena sebagian penduduk disana tidak bisa mengkonsumsi beras, mereka biasa mengkonsumsi sagu, maka pemerintah disana hanya mempergunakan dana beras miskin tersebut untuk membagikan

sayur, umbi, dan makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat. Selain itu, dengan sistem otonomi daerah pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu, tanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan Negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan Negara, seperti contoh pelaksanaan Undang-undang Anti Pornografi di tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan sistem otonomi daerah maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, selain itu karena memang dengan sistem otonomi daerah membuat peranan pemerintah pusat tidak begitu berarti.

5. Industri Kecil

Membicarakan masalah kelompok usaha yang termasuk dalam usaha kecil dan menengah disingkat UKM tidak mudah. Banyak istilah yang muncul dalam hubungannya dengan usaha kecil dan menengah. Ada yang menyebut golongan ekonomi lemah (GEL) atau pengusaha ekonomi lemah (pegel), usaha mikro ada juga yang menggunakan istilah industri kecil dan sedang, serta ada juga menyebut dengan industri rumah tangga. Dalam studi ini digunakan istilah UKM. Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menengkop dan UKM):

Usaha kecil (UK) termasuk usaha mikro (UMI), adalah istilah usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak RP 1.000.000.000

a. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS):

UK berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.

b. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316 /KMK.016/1994 tanggal 27 juni 1994 :

Usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/ usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya RP 600.000.000.atau asset/aktiva setinggi-tingginya RP 600.000.000.(di luar tanah dan bangunan yang ditempati)

terdiri dari : (1) bidang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, perdagangan barang dan jasa)

c. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil :

1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Ada dua defenisi usaha kecil yang di kenal di Indonesia. Pertama, defenisi usaha kecil menurut Undang-Undang No.9 tahun 1995 tentang Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kendati defenisi mengenai usaha kecil namun agaknya usaha kecil karakteristik yang hampir seragam .Pertama, tidak adanya pembagian

tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan usaha kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. Kedua rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir. Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan dipunyainya status badan hukum. Menurut catatan BPS dari jumlah perusahaan kecil sebanyak 124.990, ternyata 90,6 persen merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta notaris ; 4,7 persen tergolong perusahaan perorangan berakta notaris ; dan hanya 1,7 persen yang sudah mempunyai badan hukum (PT/NV,CV,Firma atau koperasi). Keempat, dilihat menurut golongan industri tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industry makanan, minuman,dan tembakau, diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam, industri tekstil , dan industri kayu,bamboo,rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga masing-masing berkisar antara 21% hingga 22% dari seluruh industri kecil yang ada. Sedangkan yang bergerak pada kelompok usaha industry kertas dan kimia relatif masih sangat sedikit sekali yaitu kurang dari 1%.

Sejak lama Pemerintah sudah melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah. Pembinaan terhadap kelompok usaha ini semenjak kemerdekaan telah mengalami beberapa perubahan. Dahulu pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah dipisahkan dengan pembinaan terhadap koperasi. Setelah melalui beberapa perubahan maka semenjak beberapa tahun terakhir pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi dilakukan satu atap di bawah Departemen Koperasi Pengusaha kecil dan Menengah.

Sebelum dilaksanakannya Otonomi Daerah Pembinaan terhadap usaha kecil, menengah, dan koperasi ditangani langsung oleh jajaran Departemen koperasi dan UKM yang berada di daerah. Sedangkan pemerintah daerah hanya sekedar memfasilitasi, kalau tidak boleh dikatakan hanya sebagai penonton. Semua kebijakan dan pedoman pelaksanaannya merupakan kebijakan yang telah ditetapkan dari pusat, sementara aparat dilapangan hanya sebagai pelaksana. Pembinaan yang diberikan tersebut cenderung dilakukan secara seragam terhadap seluruh Daerah dan lebih bersifat mobilisasi dibandingkan pemberdayaan terhadap usaha kecil dan menengah dalam rangka otonomi daerah, penting kiranya untuk diperhatikan aspek kebaikan kebijakan. Karena faktor kebijakan sangat menentukan tersedia atau tumbuhnya lingkungan usaha yang kondusif. Kebijakan didefinisikan sebagai 'satu set keputusan

yang saling terkait yang diambil oleh seorang atau sekelompok factor politik tentang suatu tujuan dan cara mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan itu, secara prinsip berada dalam wilayah kekuasaan aktor-aktor tersebut.

Era Otonomi Daerah bukan merupakan ancaman bagi upaya pengembangan usaha kecil dan menengah, namun sebaliknya justru memberikan kesempatan dan dukungan bagi pengembangan UKM tersebut. Dengan kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya terbuka kesempatan untuk mengembangkan UKM secara optimal di daerah. Dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia di Daerah diharapkan upaya pengembangan UKM akan dapat diwujudkan. Potensi sumber daya alam yang tersedia di daerah menyediakan bahan baku yang cukup memadai bagi pengambilan UKM. Sedangkan potensi SDM di daerah menyediakan tenaga kerja yang secara bertahap dapat ditingkatkan kualitasnya.

Sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepala Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya maka pembinaan usaha kecil dan menengah harus melibatkan seluruh komponen di Daerah. Peran Pemerintah Daerah

sebagai pelaksana kewenangan penyelenggaraan pemerintah Daerah Otonom akan sangat menentukan bagi pembinaan UKM.

Dalam upaya penguatan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam rangka Otonomi Daerah, maka pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah perlu dirumuskan dalam suatu pola pembinaan yang dapat memberdayakan dan mendorong peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah tersebut. Pola pembinaan tersebut harus memperhatikan kondisi perkembangan lingkungan strategis yang meliputi perkembangan global, regional, dan nasional. Disamping itu juga pola pembinaan tersebut hendaknya belajar kepada pengalaman pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah yang telah dilaksanakan selama ini.

Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.

Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil adalah : Pertama, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Kedua, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. Ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Keempat, keterbatasan jaringan usaha kerja sama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran). Kelima, iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. Keenam, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

6. Ciri Ciri Industri Kecil

Industri kecil umumnya berskala kecil, kurang maju dalam teknologi, sangat bergantung pada sumber daya lokal, jauh lebih padat tenaga kerja, tenaga kerja berasal dari pekerja yang masih memiliki hubungan kekeluargaan, memiliki akses dana sendiri atau lokal, merupakan fenomena/industri pedesaan.

7. Jenis Jenis Industri Kecil

Jenis-jenis industri ada 3, yaitu : industri lokal, industri sentra, industri mandiri

8. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Industri

Faktor-faktor yang mempengaruhi industri ada 5, yaitu:

1. bahan mentah, tidak ada barang yang dapat dibuat jika tidak ada bahan mentahnya, misalnya untuk industri pensil dibutuhkan tambang grafit dan kayu jenis khusus tentunya.
2. sumber tenaga(power resource), ini menyangkut tenaga air (hydro power) atau pelistrikan untuk menggerakkan mesin pabrik.
3. suplai tenaga kerja, hal ini menyangkut dua segi yakni kuantitatif (jumlah tenaga kerja) dan kualitatif (keterampilan yang dimiliki tenaga kerja).
4. Suplai air, industri sudah jelas sangat memerlukan air baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
5. pemasaran, dalam dunia industri pemasaran adalah sangat penting. Karena dalam industri memproduksi barang untuk di jual.
6. fasilitas transportasi, transportasi dalam industri sangat penting baik untuk mendatangkan bahan baku maupun menyebarkan produk.

9. Lokasi Industri

Penempatan lokasi industri mempunyai peranan yang sangat penting, sebab akan mempengaruhi perkembangan dan kontinuitas proses dan kegiatan itu sendiri.

Adapun berdasarkan lokasi industri ada 3 yaitu:

1. Industri yang berlokasi ditempat bahan mentah berasal
2. Industri yang berlokasi di daerah pemasaran
3. Industri yang berlokasi di tempat yang banyak terdapat tenaga kerja

10. Teori-teori yang relevan

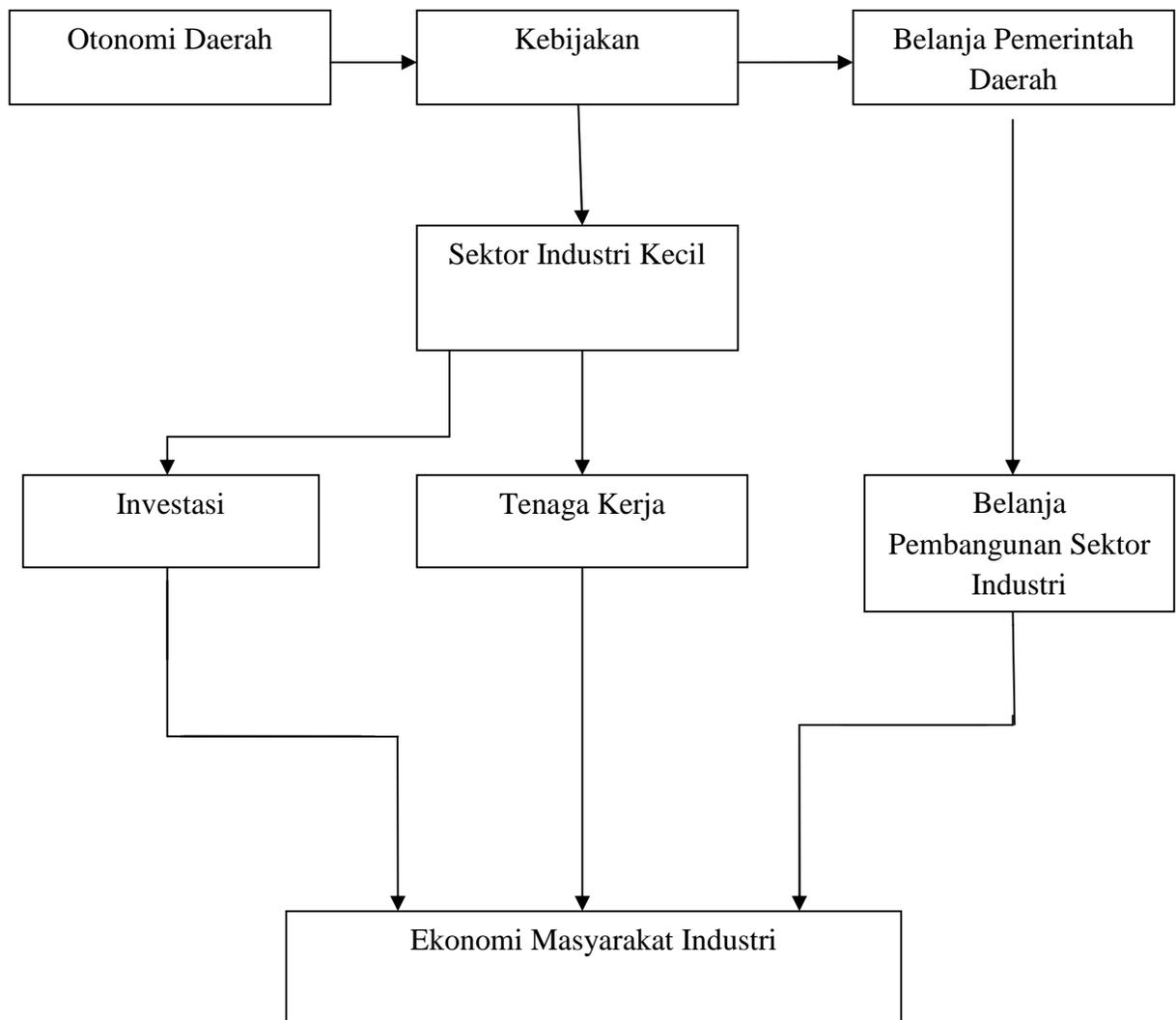
Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses. Suatu proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar pasar baru, dan transformasi pengetahuan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan.

B. Kerangka Konsep

Adapun bagan kerangka konsep sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang di pergunakan dalam penelitian. Jenis penelitian yang umum dipakai adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif ini menjadikan penulis mudah dalam pengambilan data.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lembata, yang merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Lembata dijadikan objek penelitian karena dilihat dari letak geografis, luas wilayah, dan populasi penduduk, menjadikan wilayah ini memiliki peranan penting dalam perekonomian.

C. Informan Penelitian / Sumber Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif memiliki keunikan sebab metode ini tidak mempersoalkan seberapa banyak responden yang di butuhkan untuk memberikan informasi, akan tetapi sejauhmana ketajaman menggali permasalahan yang ada di lapangan, walaupun dengan memanfaatkan satu atau dua orang responden yang dibutuhkan, melainkan sangat tergantung pada saat penelitian berlangsung. Informan adalah mereka yang betul-betul memahami dan sering terlibat dalam

masalah tersebut ditambah berbagai sumber yang mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek atau informan penelitian yaitu Pemerintah yang berjumlah 6 orang, Pedagang industri 4 orang, dan Pengelola industri 4 orang.

D. Fokus Penelitian

Peneliti memilih judul Otonomi Daerah Sebagai Kemajuan Ekonomi Masyarakat Industri Kecil Di Kabupaten Lembata, dimana Kabupaten Lembata merupakan sebuah pulau kecil di perairan sekitar Kabupaten Flores Timur yang resmi menjadi Kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Flores Timur sehingga peneliti tertarik mengambil judul tersebut untuk mengetahui perkembangan Kabupaten Lembata yang terpisah dari Kabupaten Flores Timur setelah otonomi daerah.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat berupa kamera, alat perekam, lembar observasi, dan peneliti sendiri.

F. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian bersumber dari data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui hasil wawancara atau pengamatan. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak kedua.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Observasi

Teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara mengamati pandangan masyarakat terhadap otonomi daerah sebagai kemajuan ekonomi masyarakat industry kecil di Kabupaten Lembata.

2. Teknik Wawancara (Interview)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topic tertentu yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Lembata Secara mendalam teknik wawancara dapat dilaksanakan dengan menggunakan empat cara yakni:

- a. Wawancara Individual : Wawancara ini dilaksanakan dalam suatu kesempatan pengambilan sampel atas responden yang dipilih dengan sengaja untuk memperoleh informasi atau data yang representative
- b. Wawancara dengan Informan kunci / tokoh-tokoh kunci (key informan/keypersons): wawancara dengan key informan atau keypersons bertujuan untuk mendapatkan informasi khusus yang berkaitan pengetahuan dan

pemahaman terhadap otonomi daerah sebagai kemajuan ekonomi masyarakat industri kecil.

- c. Wawancara kelompok : Dengan cara terstruktur dan tidak terstruktur. Teknik ini lebih memberikan akses pada sosok pengetahuan yang lebih besar dan secara mendalam tentang informasi dan data.
- d. Partisipatif Adalah : Suatu gejala demokrasi dimana orang ikut serta dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajiban.

H. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bias lebih mudah untuk dipahami. Analisis ini menggunakan teori-teori yang relevan artinya teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kumpulan informasi yang sintesis dan terarah yang memberikan adanya penarikan suatu kesimpulan. Sehingga penyajian data dalam hal ini akan berbentuk narasi. Data yang disajikan dalam penelitian ini yang tertera dalam fokus penelitian. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga dalam proses analisis data. Setelah data dianalisa terus menerus pada waktu pengumpulan data dilapangan, dalam proses maupun setelah dilapangan maka dilakukan proses penarikan kesimpulan dan

verifikasi dari hasil yang sesuai dengan data yang telah peneliti kumpulkan dalam penelitian lapangan.

I. Teknik Keabsahan Data

Merupakan teknik yang digunakan untuk meyakinkan publik/ masyarakat mengenai data yang didapatkan dapat dipercaya atau dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sehingga peneliti dapat berhati-hati dalam memasukan data hasil penelitian, data yang dimaksudkan adalah data yang sudah melalui berbagai tahapan keabsahan data.

J. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan penelitian	Bulan ke					
		I	II	III	IV	V	VI
1.	Menyusun Proposal	■					
2.	Bimbingan Proposal		■				
3.	Ujian Proposal			■			
4.	Penelitian Proposal				■		
5.	Penyusunan Skripsi					■	
6.	Ujian Skripsi						■

BAB IV

GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Lembata

Dahulu Pulau Lembata bernama pulau Lomblen dan Pulau Kewula. Kedua nama ini dijuluki oleh Belanda melalui politik dagangnya yaitu VOC (Verinigde Oos Indice Company). Dalam perjalanan sejarah pulau ini terus berubah nama menjadi Lembata, nama ini diberi oleh Alm. Yan Kia Poli pada saat diadakannya MUBESRATA (Musyawarah Besar Rakyat Lembata) pada tanggal 7 maret 1976 di Lewoleba, dan kemudian diresmikan oleh mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur El Tari. Nama ini dipakai sampai sekarang.

Sebenarnya, lahirnya pulau Lembata diperkirakan pada tahun 1400 ketika terjadi zaman Gletzer yaitu zaman dimana mencairnya es kutub sehingga banyak pulau yang tenggelam dan kemudian penduduknya migran ke berbagai daerah untuk mencari tempat tinggal yang baru. Dalam penuturan sejarah orang Lembata sebenarnya bermigran dari dua pulau yaitu pulau Lapang dan pulau Batang yang terletak di bagian barat Kabupaten Alor Lapang dan Batang (dua pulau kosong tak berpenghuni) yang terletak di bagian barat pulau Alor dan bagian timur ke utara dari pulau Lembata. Lapanbata atau Lapang dan Batang menurut orang Alor adalah dua buah pulau tak berpenghuni. Lapang artinya datar/rata seperti lapangan sedangkan Batang artinya tinggi. Kedua pulau ini memiliki kekayaan alam yang tak akan habisnya yaitu rumput laut yang kini menjadi primadona orang Alor.

Ketika masyarakat ini migran karena tenggelamnya sebagian pulau Lapang dan Batang (air laut naik), orang Lembata dalam penjelajahannya

untuk mencari tempat baru sebagai tempat tinggal, mereka menemukan pulau Lomblen atau Kewula atau Lembata sekarang, yang merupakan pulau yang baru muncul bersama pulau Kangge, Rusa dan Kambing, yang kini menjadi wilayah pemerintahan kabupaten Alor. Dalam perjalanannya dari pulau Lapang dan Batang (Lepanbata) ke arah utara menelusuri laut mereka tinggal dan menetap pertama kali di Wairiang, kemudian ke arah utara dan mendiami Edang Aya Wei Laong di Ramu tempat yang terletak diantara Leo Hoeq, Atarodang dan Maramu dekat Leuwayang.

Sementara itu pelarian yang lain meneruskan perjalanan mereka ke Nuhalela, Lamalera dan Lamabaka dan menyebar ke seluruh wilayah Lembata. Ketika terjadi peristiwa Awololon (pulau di depan kota Lewoleba) tenggelam, maka penduduknya menyebar ke Lembata, Adonara, Solor, Pulau, Babi dan Pulau Palue (Maumere), Wailamung dan Bogonatar (Perbatasan Larantuka dengan Kabupaten Sikka).

Percaya atau tidak tetapi ada secul peristiwa yang dapat disarikan dari peristiwa pelarian orang Lembata dari Lapang dan Batang. Ada sejumlah suku yang ketika migran mereka terlebih dahulu membuat perjanjian untuk mengikat tali persaudaraan mereka. Perjanjian itu adalah menggunakan kata LAMA dalam penamaan suku-suku yang di bawah oleh mereka. Maka semua suku pada waktu itu sepakat untuk menggunakan kata LAMA pada suku mereka. Dengan demikian maka semua suku migran dari Lapang dan Batang menjadikan kata LAMA sebagai tali pengikat hubungan kekerabatan dan juga dapat mencari saudara mereka yang lain. Ternyata ada suku di Lembata, Adonara dan Solor menggunakan kata LAMA.

Suku-suku itu antara lain Ruman Laba Bae, Likur Lama Koma, Wahan Lama Bera, Wayan Lama Holen, Lida Lama Loru, Matan Lama Mangan, Kape Lama Bura, Witing Lama Hingan, Hapu Lama Boleng, Hoe

Lama Dike, Lera Lama Dike, Kowa Lama Botung, Nila Mani Tolo, Tolo Lama Ile, Watun Lama Gute, Wutun Lama Doan, Lama Blawa, Lama Helan, Lamaheku, Lama Ole, Lama Nepa, Lama Tonu Mata.

Sejak 01 Juli 1967 sebutan untuk penduduk yang semula “Orang Lomblen” berubah menjadi “Orang Lembata”. Lembata sebelumnya bergabung dengan Kabupaten Flores Timur, tapi tahun 1999 terjadi pemekaran dan Lembata menjadi Kabupaten sendiri.

B. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Kondisi Fisik dan Luas Wilayah Kabupaten Lembata

Kabupaten Lembata yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Flores Timur adalah salah satu Kabupaten dari 21 Kabupaten / kota se Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini merupakan Kabupaten satu pulau dengan topografi berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan sebagian kecil tanah datar di wilayah pesisir pantai dan dikelilingi perairan laut dengan potensi sumberdaya kelautan yang besar namun belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dan memadai.

Pemerintah Kabupaten Lembata terbentuk dengan undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967).

Penduduk Kabupaten Lembata sebagian besar merupakan Suku Melayu yang terbagi lagi dalam sekian banyak suku / marga tersebar di 151 Desa / Kelurahan. Disamping itu terdapat juga beberapa suku lain, antara lain Melayu, Tionghoa, Jawa, Bugis, Sumatra,dll. Mayoritas penduduk beragama

Katholik (90.068 jiwa atau 66,75%), disamping yang beragama Islam (38.585 jiwa atau 28,59%), Kristen (2.185 jiwa atau 1,62%), Hindu (86 jiwa atau 0,06%), Budha (7 jiwa atau 0,01%). Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah Bahasa Indonesia, disamping bahasa ibu masing-masing dalam rumpun bahasa melayu dengan variasi dialek yang berbeda pada hampir setiap desa serta bahasa Kedang.

Secara administrative, Kabupaten Lembata dengan luas wilayah $4.620,28 \text{ Km}^2$, yang terdiri dari luas daratan $1.266,39 \text{ Km}^2$ (27,41%) dan luas perairan laut $3.353,89 \text{ Km}^2$ (72,59%) serta panjang garis pantai diperkirakan sepanjang $492,89 \text{ Km}^2$, terbagi atas 9 Kecamatan, 7 Kelurahan, dan 144 Desa. Luas wilayah setiap kecamatan adalah Kecamatan Lebatukan : $241,90 \text{ Km}^2$, meliputi 17 Desa; Kecamatan Ile Ape $96,86 \text{ Km}^2$, meliputi 17 Desa; Kecamatan Omesuri $161,91 \text{ Km}^2$, meliputi 22 Desa; Kecamatan Buyasuri : $104,26 \text{ Km}^2$, meliputi 20 Desa; Kecamatan Atadei : $150,42 \text{ Km}^2$, meliputi 15 Desa; Kecamatan Nagawutung: $185,70 \text{ Km}^2$, meliputi 18 Desa; Kecamatan Nubatukan: $165,64 \text{ Km}^2$, meliputi 7 Kelurahan dan 11 Desa; Kecamatan Wulandoni: $121,44 \text{ Km}^2$, meliputi 15 Desa dan Kecamatan Ile Ape Timur: $38,26 \text{ Km}^2$, meliputi 9 Desa.

Secara geografis Kabupaten Lembata terletak pada $08^\circ 04' - 08^\circ 40'$ Lintang Selatan (LS) dan $122^\circ 38' - 123^\circ 57'$ Bujur Timur (BT). Secara keseluruhan, Kabupaten Lembata yang merupakan Kabupaten satu pulau dan berada di Pulau Lembata atau Pulau Lomblen dalam Peta Indonesia memiliki batas wilayah sbb:

- Bagian Utara berbatasan dengan Laut Flores
- Bagian Selatan berbatasan dengan Laut Sawu
- Bagian Timur berbatasan dengan Selat Merica
- Bagian Barat berbatasan dengan Selat Boleng dan Selat Lamakera

Topografi Kabupaten Lembata terdiri dari sebagian kecil daerah dataran yang berada di wilayah pesisir pantai dengan tingkat kemiringan yang bervariasi antara 0-40 % dan sebagian besar daerah berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan tingkat kemiringan diatas 40 % memiliki puncak tertinggi berada pada ketinggian 1.319 meter diatas permukaan laut yakni Gunung Ile Ape di wilayah Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, disamping gunung-gunung lain dengan ketinggian lebih rendah yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan lain.

Kabupaten Lembata beriklim tropis dengan musim hujan (Bulan basah) yang relative pendek : rata-rata 3-4 bulan dengan rata-rata curah hujan 50 mm/ 100 hari hujan dan musim kemarau (Bulan kering) yang relative panjang : rata-rata 8-10 bulan. Suhu rata-rata 26 C-29 C dengan suhu 23 C dan suhu maksimum 30 C.

Kabupaten Lembata dengan luas daratan 1.266,39 Km^2 didiami penduduk pada akhir Tahun 2014 sebanyak 134.931 jiwa, tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan yaitu, Kecamatan Lebatukan, Atadei, Nagawutung, Ile Ape, Omesuri, Buyasuri, Nubatukan, Wulandoni dan Kecamatan terbesar terdapat di Kecamatan Nubatukan yakni sebanyak 40.648 Jiwa (30%), sedangkan Kecamatan Ile Ape Timur memiliki jumlah penduduk terkecil, yakni 5.913 jiwa (4,3%). Khusus untuk kecamatan Nubatukan, dari jumlah 40.648 jiwa tersebut, jumlah terbesar berada dalam Kota Lewoleba yang meliputi 7 (tujuh) Kelurahan yakni sebanyak 35.200 jiwa (86,59% dari Penduduk Kecamatan Nubatukan).

Secara keseluruhan, jumlah penduduk Kabupaten Lembata pada akhir tahun 2014 atau awal tahun 2015 yang dirinci berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin, dapat disajikan dalam Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Lembata Akhir Tahun 2014
Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin :

Kecamatan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Penduduk	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
NAGAWUTUNG	4.479	3,32	4.928	3,65	9.407	6,97
ATADEI	3.530	2,62	4.209	3,12	7.739	5,74
ILE APE	5.971	4,42	7.059	5,24	13.030	9,66
LEBATUKAN	4.329	3,21	4.970	3,68	9.299	6,89
NUBATUKAN	20.196	14,97	20.452	15,16	40.648	30,13
OMESURI	9.077	6,72	9.995	7,41	19.072	14,13
BUYASURI	9.789	7,25	11.035	8,18	20.824	15,43
WULANDONI	4.148	3,07	4.851	3,59	8,999	6,66
ILE APE TIMUR	2.685	1,99	3.228	2,39	5.913	4,38
Total Jumlah	64.204	47,58	70.727	52,42	134.931	100

Sumber : Data SIAK Kab.Lembata Akhir 2014,Diolah

Dari tampilan Tabel 1 tersebut diatas, jelas terlihat bahwa Kecamatan Nubatukan memiliki jumlah penduduk terbanyak yakni 40.468 jiwa, setelah itu diikuti oleh Kecamatan Buyasuri (20.824 jiwa), Kecamatan Omesuri (19.072 jiwa), Kecamatan Ile Ape Timur (13.030 jiwa), Kecamatan Nagawutung (9.407 jiwa) Kecamatan Lebatukan (9.299 jiwa), Kecamatan Wulandoni (8,999 jiwa), Kecamatan Atadei (7.739 jiwa) dan Kecamatan Ile Ape Timur (5.913 jiwa).

Apabila jumlah penduduk dikaitkan dengan jenis kelamin dan persebaran maka jumlah terbesar berjenis kelamin perempuan, yakni 70.727 jiwa sedangkan laki-laki sebanyak 64.204 jiwa. Dari jumlah tersebut kecamatan Nubatukan yang memiliki jumlah penduduk terbesar, yakni 40.648

jiwa dengan rincian 20.452 jiwa penduduk perempuan dan 20.196 jiwa penduduk laki-laki, tingkat persebaran terbanyaknya berada pada 7 (tujuh kelurahan) dalam Kota Lewoleba yakni Kelurahan Lewoleba, Lewoleba Utara, Lewoleba Selatan, Lewoleba Barat, Lewoleba Timur, Lewoleba Tengah dan Kelurahan Selandoro, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Lewoleba pada Akhir Tahun 2014 Berdasarkan Kelurahan dan Jenis Kelamin

Kelurahan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Penduduk	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Lewoleba	2.490	1,84	2.480	1,84	4.970	3,68
Lewoleba Timur	2.424	1,79	2.432	1,80	4.856	3,59
Lewoleba Tengah	2.751	2,04	2.838	2,10	5.589	4,14
Lewoleba Utara	2.249	1,66	2.263	1,68	4.512	3,34
Lewoleba Barat	2.210	1,64	2.319	1,72	4.529	3,36
Selandoro	3.743	2,77	3.741	2,77	7.484	5,54
Lewoleba Selatan	1.637	1,21	1.623	1,20	3.260	2,41
Total Jumlah	17.504	12,97	17.696	13,11	35.200	26,08

Sumber: Data SIAK Kab.Lembata Akhir 2014,Diolah

Dari sajian Tabel 2 diatas, menarik juga untuk dicermati kenyataan bahwa dari aspek jumlah penduduk se Kabupaten Lembata maka total

jumlah penduduk pada 7 (tujuh) Kelurahan dalam Kota Lewoleba saja ternyata jauh melampaui total jumlah penduduk di setiap kecamatan se Kabupaten Lembata.

Secara keseluruhan, tinggi / rendahnya jumlah dan persebaran penduduk di suatu wilayah akan berkorelasi langsung pada berbagai aspek kehidupan bersama antara lain terkait pemanfaatan lahan untuk peningkatan pemanfaatan kebutuhan ekonomi masyarakat dan perencanaan pembangunan infrastruktur di butuhkan dalam menunjang peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dan pemerataan pembangunan secara proposional.

Secara keseluruhan, jika dicermati luas wilayah daratan kabupaten Lembata yakni 1.266,39 Km^2 dengan jumlah penduduk sebesar 134.931 jiwa maka kepadatan penduduk Kabupaten Lembata masih sangat kecil yakni hanya berkisar antara 106-107 jiwa per kilometer persegi.

Jika dirinci kepadatan penduduk perkecamatan maka kepadatan penduduk pada 9 Kecamatan se Kabupaten Lembata dapat dicermati dalam sajian tabel berikut ini.

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH (Km^2)	JUMLAH PENDUDUK PER Km^2
1.	NAGAWUTUNG	9.407	185,70	50-51 Orang
2.	ATADEI	7.739	150,42	51 Orang
3.	ILE APE	13.030	96,86	134-135 Orang
4.	LEBATUKAN	9.299	241,90	38 Orang
5.	NUBATUKAN	40.648	165,64	245 Orang

6.	OMESURI	19.072	161,91	117-118 Orang
7.	BUYASURI	20.824	104,26	199-200 Orang
8.	WULANDONI	8.999	121,44	74 Orang
9.	ILE APE TIMUR	5.913	38,26	154-155 Orang
JUMLAH		134.91	1.266,39	106-107 Orang

Sumber : Data SIAK Kab.Lembata Akhir 2014,Diolah

Dari sajian Tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Nubatukan yakni 245 orang menyusul Kecamatan Buyasuri yakni 199-200 orang/ Km^2 . Kecamatan Ile Ape Timur yakni 154-155 orang / Km^2 , Kecamatan Ile Ape yakni 134-135 orang/ Km^2 , Kecamatan Omesuri yakni 117-118 orang/ Km^2 , Kecamatan Wulandoni yakni 74 orang/ Km^2 , Kecamatan Atadei yakni 51 orang/ Km^2 , Kecamatan Nagawutung 50-51 orang/ Km^2 , dan yang terendah adalah Kecamatan Lebatukan 38 orang/ Km^2 .

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara tiga komponen demografi yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk disuatu wilayah, yakni Fertilitas (Kelahiran penduduk baru). Mortalitas (Kematian penduduk pada semua kelompok umur) dan Migrasi/Mutasi baik Migrasi/Mutasi keluar mengakibatkan pengurangan jumlah penduduk, sebaliknya Mortalitas dan Migrasi/Mutasi keluar mengakibatkan pengurangan jumlah penduduk. Selisih antara Fertilitas dan Mortalitas disebut perubahan reproduktif (reproductive change) atau pertumbuhan alamiah(natural growth),

sedangkan selisih antara migrasi/mutasi masuk dan migrasi/mutasi keluar disebut migrasi neto (net migration).

Secara keseluruhan, sejalan dengan sistem registrasi penduduk melalui pelayanan pendaftaran penduduk dimana jumlah penduduk dapat diketahui secara langsung dari database kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) maka proporsi pertumbuhan penduduk Kabupaten Lembata selama lima tahun terakhir, yakni dari Tahun 2010 hingga akhir Tahun 2014 (Awal tahun 2015) dapat dicermati dalam perbandingan jumlah penduduk yang disajikan dalam Tabel 4 di bawah ini.

KECAMATAN	Jumlah Penduduk Kabupaten Lembata Pada Akhir Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
NAGAWUTUNG	8.900	8.832	9.243	9.197	9.407
ATADEI	7.866	7.714	7.795	7.545	7.739
ILE APE	12.344	12.232	13.666	12.879	13.030
LEBATUKAN	8.549	8.443	9.135	8.907	9.299
NUBATUKAN	34.822	34.560	40.621	39.777	40.648
OMESURI	16.973	16.880	18.092	18.407	19.072
BUYASURI	21.850	21.769	20.570	20.861	20.824
WULANDONI	8.656	8.607	8.778	8.666	8.999
ILE APE TIMUR	5.731	5.657	6.537	5.538	5,913
Total Jumlah	125.711	124.694	134.437	131.777	134.931

Sumber : Data SIAK Kab.Lembata Akhir 2014,Diolah

Dari sajian Tabel 4 tersebut diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang berkolerasi langsung dengan tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Lembata menunjukkan angka-angka perbandingan yang masih

relatif dimana bertambah/berkurangnya jumlah penduduk berada pada kisaran jumlah dibawah 10.000 jiwa.

2. GAMBARAN EKONOMI DAERAH

a. Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan

Jenis tanaman pangan yang paling dominan diusahakan oleh penduduk Kabupaten Lembata setiap tahun adalah Jagung, Padi (padi sawah dan padi lading), Ubi-ubian (Ketela pohon, Ketela rambat dll) dan Kacang-kacangan (Kacang tanah, Kacang hijau, dll). Disamping itu di budidaya juga tanaman sayur-mayur antara lain Pitsai, Kol, Terung, Tomat, Wortel, Cabe (Lombok), dll. Sedangkan tanaman buah-buahan yang dominan ada di Kabupaten Lembata adalah Pisang, Mangga, Nenas, Nangka, Kates (Pepaya), dll. Tanaman pangan, sayur-mayur dan buah-buahan tersebut diatas rata-rata diusahakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dijual di pasar lokal.

b. Perikanan

Kabupaten Lembata memiliki perairan laut seluas 3.354,363 Km^2 (72,59% dari total luas wilayah Kabupaten Lembata) dan garis pantai yang melingkari Pulau Lembata sekitar 492,80 Km^2 . Dengan luas perairan laut yang berada diantara dua laut yang kaya dengan potensi dan keanekaragaman sumber daya hayati perikanan yakni Laut Flores dan Laut Sawu maka perairan laut Kabupaten Lembata memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat variatif, terdiri dari berbagai jenis ikan, baik pelagis maupun demersal yang bernilai ekonomis penting, seperti ikan tuna, cakalang, tongkol, tenggiri, kembung, layang, cendro, julung-julung, lobster, kakap, kerapu, cumi-cumi, kepiting, kerang mutiara, rumput laut, teripang serta berbagai jenis kerang-kerangan.

Dengan potensi sumber daya perikanan yang sangat variatif tersebut maka kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata terkait Pengembangan Usaha Perikanan Laut, diplotkan wilayah perairan pantai utara Kabupaten Lembata diprioritaskan untuk pengembangan budidaya laut dengan tidak menutup peluang untuk pengembangan perikanan tangkap sedangkan wilayah perairan pantai selatan Kabupaten Lembata diprioritaskan untuk pengembangan perikanan tangkap dengan tidak menutup peluang untuk pengembangan budidaya laut.

c. Perdagangan

Sejalan dengan dinamika pertumbuhan/perkembangan pembangunan yang ada dan semakin meningkatnya upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk hidup semakin layak dalam berbagai aspek kehidupan bersama maka usaha perdagangan di Kabupaten Lembata mengalami perkembangan, meskipun nampaknya masih lamban karena terbentur pada sejumlah ketebatasan yang ada, antara lain masih terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, baik lokal di dalam wilayah Kabupaten Lembata maupun antar pulau.

Jika dicermati perkembangan usaha perdagangan berdasarakan omset usaha yang dimiliki maka Kabupaten Lembata sampai dengan awal tahun 2012 tercatat ada 589 pedagang, dengan rincian pedagang mikro sebanyak 8 pedagang, pedagang kecil sebanyak 371 pedangan, pedagang menengah sebanyak 133 pedagang, dan pedagang besar sebanyak 76 pedagang.

d. Transportasi

- Udara

Kabupaten Lembata melalui Bandara udaranya, Bandara Udara Wunopito yang terletak di dalam kota Lewoleba sebagai ibu kota Kabupaten Lembata, terhubung dengan Kota Kupang Ibukota Provinsi NTT. Pengguna

jasa transportasi udara melalui Bandara Wunopito terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

- **Laut**

Pelabuhan Laut Lewoleba merupakan salah satu pintu masuk ke Kabupaten Lembata yang paling banyak melayani kapal-kapal barang maupun penumpang dari dan ke Lembata, disamping Pelabuhan Laut Lewoleba bahkan sudah mampu melayani Kapal pelni, yang terakhir hingga sekarang adalah Kapal Bukit Siguntang, disamping itu Kapal Ferry rute Kupang Lewoleba dan rute Alor.

- **Darat**

Sistem transportasi darat di Kabupaten Lembata dilayani oleh angkutan kota dan beberapa rute dilayani dengan Bus. Disamping itu tersedia juga jasa ojek yang siap melayani pengguna jasa yang membutuhkan. Untuk transportasi keluar kota menuju kecamatan dan desa dilayani melalui dua terminal yakni Timur dan Barat.

C. SISTEM KEBUDAYAAN MASYARAKAT LEMBATA

Kebudayaan masyarakat Lembata merupakan salah satu tradisi turun temurun yang diwariskan dari nenek moyang mereka dan sampai sekarang pun belum punah. Hal ini sudah mendara daging dalam tubuh masyarakat Lembata. Disisi lain juga tradisi ini merupakan salah satu peristiwa atau pengetahuan dimana dapat memotivasi keturunan mereka dalam mengetahui kebudayaan orang atau sekelompok masyarakat dengan lain kebudayaannya.

Budaya Lembata memiliki keanekaragaman budaya yang unik dalam tradisi Lamaholot yang selalu di junjung tinggi dengan norma-norma sosial, agama, suku dan bahasa. Masyarakat Lembata memiliki beberapa bahasa yakni Atadei, Leragere, Ile Ape, Kedang, Puor, Lamalera.

Letak Pulau Lembata menyempil diantara dua kabupaten yakni di timur Alor, dan di barat dengan Kabupaten Flores Timur. Batas Kabupaten Lembata di wilayah utara dengan Laut Flores dan Selatan dengan Laut Sawu.

Pola hidup masyarakat Lembata pada umumnya bercocok tanam dengan lahan yang berpindah-pindah serta memilih untuk merantau ke Malaysia. Namun dengan adanya kesadaran masyarakat kini yang semakin bertambah dalam pengelolaan lahan pertanian seperti kelapa, kopi, kemiri, vanili, pala, pinang, jati, cendana, jambu mete, coklat, cengkeh yang dapat memberikan manfaat bagi ekonomi hidup keluarga.

Pulau Lembata menyimpan sejuta kekhasan budaya dan obyek wisata bahari yang mengagumkan. Salah satu yang paling terkenal adalah budaya menangkap Ikan Paus dengan menggunakan alat dan metode yang sangat tradisional. Tak heran sering kita dengar ada nelayan Lembata yang terdampar hingga ke perairan Australia karena perahunya terseret Paus.

Hal lain yang juga menarik adalah sistem perekonomian masyarakat Lembata yang masih menggunakan sistem pertukaran (barter) atau yang dalam bahasa lokalnya disebut Gelu Gore atau Kelung Lodong. Tradisi barter ini masih terus diterapkan ditengah kuatnya intervensi uang sebagai alat tukar modern. Masyarakat Lembata hanya menggunakan uang sebagai alat tukar untuk barang-barang industri seperti pakaian, minyak, sabun, dan gula pasir. Penggunaan uang juga hanya terbatas untuk pembayaran fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Selebihnya seluruh kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Lembata diperoleh melalui proses transaksi barter.

Secara realita kita ketahui bahwasannya dizaman sekarang terutama dikalangan kaum remaja sering dipengaruhi oleh material, sehingga dapat mencederai pola pikir mereka yang dapat mengakibatkan mereka lupa akan

kebudayaan mereka. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat Lembata yang justru tetap membudidayakan kebudayaan mereka.

D. Visi dan Misi Kabupaten Lembata

Pemerintah Kabupaten Lembata dalam menghadapi permasalahan, tantangan dan keterbatasan yang dihadapi serta dengan memperhatikan hasil analisis dinamika lingkungan strategis dan aspirasi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Lembata sendiri mengusung visi dan misi untuk menanggapi persoalan tersebut.

Visi :

Mewujudkan masyarakat Lembata yang bermoral, sejahtera, mandiri dan beretos kerja tinggi, berdasarkan hukum, memiliki sikap kegotong-royongan untuk menjalin semangat persatuan dan persaudaraan menuju wadah kesatuan negara Republik Indonesia.

Misi :

1. Pengembangan ekonomi rakyat dengan memanfaatkan sumberdaya lokal berbasis komoditas unggulan
2. Optimalisasi pendidikan dan kesehatan rakyat dipedesaan dan diperkotaan untuk menumbuhkan sikap mandiri dan beretos kerja tinggi
3. Memberdayakan masyarakat dan perlindungan terhadap golongan yang kurang berdaya / tidak mampu
4. Mendorong prakrsa dan peran aktif masyarakat dengan mengaktifkan sikap gotong royong dalam semangat persaudaraan sejati.
5. Meningkatkan kemampuan moral, etika kerja serta akuntabilitas aparatur pemerintah daerah
6. Mengembangkan jaringan kerjasama yang sinergis antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha

7. Meningkatkan kualitas demokrasi, penegakan hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
8. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar
9. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat
10. Mewujudkan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bagaimana Kondisi Ekonomi di Kabupaten Lembata Setelah Otonomi Daerah ?

setelah otonomi daerah dimana kita ketahui Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah tentang Pemerintahan Daerah telah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta dalam hubungan antara Pusat dengan Daerah. Kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pembinaan Implementasi kebijakan Otonomi Daerah, pembinaan terhadap kelompok usaha kecil dan menengah perlu menjadi perhatian. Pembinaan terhadap kelompok usaha kecil dan menengah bukan hanya menjadi tanggung jawab Pusat tetapi juga menjadi kewajiban tanggung jawab Daerah.

Pada Era Otonomi Daerah, usaha kecil semakin memegang peranan strategis dalam menggerakkan usaha-usaha kearah tercapainya landasan pembangunan regional yang kokoh. Sektor usaha kecil memiliki peranan yang besar dalam mempercepat tercapainya sasaran pembangunan ekonomi yang berupa penciptaan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Dalam rangka implementasi kebijakan otonomi daerah, pembinaan terhadap kelompok usaha kecil, dan menengah perlu menjadi perhatian. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi bagi masyarakat Lembata dan khususnya untuk mengurangi kendala-kendala yang terdapat pada permasalahan usaha kecil maka pemerintah daerah Lembata melalui dana otonomi memberikan bantuan dana untuk mengembangkan usaha-usaha kecil.

Salah satu upaya pemerintah tersebut adalah dengan memberikan bantuan dana serta pembinaan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) di Kab Lembata Provinsi NTT.

Sejalan dengan peran pemerintah Kabupaten Lembata mendorong pengembangan UKM, peran pemerintah Lembata terhadap UKM sama halnya dengan pemerintah pusat adalah bagaimana menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Tetapi adanya otonomi daerah telah menjadikan peran Kabupaten Lembata semakin penting dalam upaya pemberdayaan UKM. Dalam hal ini penyesuaian-penyesuaian dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sejauh mungkin diupayakan untuk tidak terlepas dari konteks pemberdayaan UKM. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lembata menjadi garis terdepan dalam pembinaan Koperasi dan UKM di Kabupaten Lembata.

Di dalam rumusan masalah ini menjelaskan tentang bagaimana kondisi ekonomi di kabupaten Lembata setelah otonomi daerah.

Setelah melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi di lapangan maka akan disajikan data-data yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut :

Meneurut Bapak Drs. Bernardus Boli Hipir selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lembata bahwa :

“ Dilihat dari keberadaan industri kecil dan menengah Di Era Otonomi Daerah ini khususnya di Kabupaten Lembata menjelaskan bahwa menghadapi persaingan bebas, usaha kecil dan menengah dinilai jauh lebih siap dilihat dari segi kemampuan SDM, skala usaha dan kemampuannya untuk melakukan inovasi dan akses pasar. Dimana pada sektor industri UKM setiap tahun terus mengalami peningkatan jumlah UKM di Kabupaten Lembata sudah semakin meningkat, hal ini menjadi lebih baik untuk perekonomian yang ada di Lembata, ini selanjutnya dapat menjadi tolak ukur seberapa besar peningkatan ekonomi masyarakat dan upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

(wawancara 31 juli 2017).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Lusiana Buke S.sos selaku pegawai di kantor koprindag bahwa :

kondisi ekonomi di kabupaten lembata setelah otonomi daerah dan sejauh mana peran pemerintah daerah dalam mengembangkan industri kecil di kabupaten lembata adalah sama seperti yang dikatakan oleh bapak kepala dinas koprindag bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terus mengalami perkembangan atau peningkatan setiap tahunnya, dimana peran dan upaya pemerintah kabupaten lembata dalam usaha industri kecil di kabupaten lembata ini setiap tahunnya ada peningkatan, pemerintah mempunyai upaya dan peranan yang sangat aktif dalam industri kecil ini, pemerintah memfasilitasi UKM yang baru tumbuh agar bisa berkembang, membangun kerjasama dengan pihak perbankan, memberikan pembinaan, memberikan modal, sehingga masyarakat industri kecil semakin termotivasi untuk mengembangkan industri sehingga UKM di kabupaten lembata terus berkembang dengan baik.

(wawancara 31 juli 2017)

Sejalan dengan yang dikatakan bapak Kepala dinas, dan staf, hal yang serupa di kemukakan oleh Bapak Drs. Benediktus Making selaku sekretaris kantor koprindag bahwa:

Pelaku usaha UKM di kabupaten Lembata kebanyakan diarahkan kepada usaha yang memanfaatkan kelebihan dan potensi daerah Lembata, dalam hal ini ciri khas Lembata. Contohnya seperti usaha tenun ikat, kami mengupayakan produk yang dihasilkan oleh pelaku UKM telah dibuat semenarik mungkin, agar produk mampu bersaing. Selain itu perlu memang untuk sering diadakan pelatihan bagi UKM dan itu sudah kami laksanakan sebagai salah satu syarat wajib untuk mendapatkan permodalan dari dinas. Itu kami lakukan agar semua pelaku UKM mampu profesional dan mampu bersaing dengan usaha-usaha yang ada di daerah lain.

(Wawancara 31 juli 2017)

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Bapak Yoanis Lalang St. Selaku staf koprindag bahwa :

Walaupun produk kami di Lembata belum mampu bersaing dengan produk dari daerah lain, namun produk kabupaten Lembata mengedepankan ciri khas daerah yang tentunya menarik konsumen yang ingin mengetahui lebih jauh bagaimana itu Lembata.

(Wawancara 31 juli 2017)

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Ibu Cristine Agustina yang juga staf Koprindag mengatakan bahwa :

Untuk mengetahui siapa pembeli produk kami ini adalah hal yang penting, hasil produksi mau kita jual dimana, siapa target pembeli, sehingga fokus dari setiap produk yang dihasilkan harus jelas terlebih dahulu sebelum di produksi termasuk lokasi pemasaran.

(Wawancara 31 juli 2017)

Hal ini juga dikemukakan oleh Ibu Yuliana selaku staf kopringdag bahwa :

Sejak berdirinya usaha ini pemerintah melakukan metode pembinaan, salah satunya pendampingan UKM dan dalam pendampingan ini tentunya pelaku UKM diberikan arahan tentang harga yang berlaku di pasaran dan kebutuhan yang dibutuhkan kebanyakan masyarakat Lembata. Walaupun dalam pelaksanaannya banyak pelaku UKM yang masih lambat dalam pertumbuhannya namun kami terus menuntunnya dan memberikan motivasi sampai ia bisa.

(Wawancara 31 juli 2017)

2. Apakah Otonomi Daerah Berpengaruh Terhadap Ekonomi Masyarakat Industri Kecil di Kabupaten Lembata ?

Di Era Otonomi Daerah sejalan dengan kewenangan yang dimiliki daerah pengembangan industri dan perdagangan akan lebih efektif jika diarahkan kepada kelompok usaha kecil dan menengah, karena pada umumnya setiap daerah memiliki kelompok usaha jenis tersebut. Dengan kewenangan yang dimiliki daerah tersebut setiap daerah akan berupaya melakukan pembinaan terhadap kelompok usaha kecil dan menengah untuk mendukung pengembangan industri dan perdagangan sesuai dengan kondisi potensi dan kemampuan masing-masing daerah.

Pemberdayaan terhadap kelompok usaha kecil dan menengah juga dapat dilakukan dalam pengembangan industri tenun ikat. Kemampuan desain dan penguasaan teknologi industri tenun ikat yang dimiliki selama ini cukup memadai. Untuk meningkatkan kapasitas kelompok usaha kecil dan menengah di bidang industri tenun ikat juga diperlukan kerjasama serta alih teknologi dan pengalaman antara kelompok usaha besar dengan kelompok usaha kecil dan

menengah. Jika kemitraan antara kelompok usaha kecil dan menengah dengan kelompok usaha besar dapat diwujudkan maka diantara kedua belah pihak akan dapat ditumbuhkan simbiosis mutualisma dimana terdapat saling ketergantungan diantara kedua belah pihak. Hal ini akan dapat mendorong percepatan pertumbuhan dan perkembangan kelompok usaha kecil, menengah, dan besar secara simultan.

Di Kabupaten Lembata dimana kita ketahui dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Lembata UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Departemen Koperasi dan UKM.

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerak sektor UKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. UKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, dan mereka juga cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan. Karena itu UKM merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi yang kompetitif.

Di Lembata, sumber penghidupan amat bergantung pada sektor UKM. Kebanyakan usaha kecil ini terkonsentrasi pada sektor perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil, kayu dan produk kayu, dan tenun ikat.

Kelompok usaha kecil dan menengah merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Keberadaan kelompok ini tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan perekonomian secara Nasional.

Menurut laporan Kepala Dinas Koprindag Kabupaten Lembata Drs. Bernardus Boli Hipir, pemerintah Kabupaten Lembata memandang perlu memberikan bantuan bahan maupun perkuatan modal usaha guna peningkatan usaha bagi industri kecil menengah khususnya masyarakat asli Lembata yang ada di wilayah Kabupaten Lembata untuk dapat terus berkembang seiring perkembangan Kabupaten Lembata merupakan kota perdagangan dan jasa yang pertumbuhannya cukup pesat. (Pemerintah Kabupaten Lembata).

Melalui pola pembinaan yang dikembangkan tersebut diharapkan akan didapat outcomes yang bersinergi antara kebijakan pembinaan usaha kecil dan menengah dengan kebijakan otonomi daerah. Sehingga antara kebijakan otonomi daerah dengan pembinaan usaha kecil dan menengah terdapat simbiosis mutualisma. Implementasi otonomi daerah akan menentukan bagi keberhasilan pembinaan usaha kecil dan menengah, serta sebaliknya pelaksanaan pembinaan UKM akan mendorong keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat .

Di dalam rumusan masalah ini menjelaskan tentang Apakah Otonomi daerah berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat industri kecil di kabupaten Lembata.

Setelah melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi di lapangan maka akan disajikan data-data yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut :

Ibu Maria Wutun selaku pedagang industri mengatakan bahwa :

Melihat pada kondisi sekarang dimana pemerintah sangat berperan aktif untuk memajukan usaha industri ini, dimana adanya pendekatan dari pemerintah sehingga dapat menumbuhkan semangat masyarakat dalam melaksanakan usaha atau industri kecil maupun menengah, dengan adanya dukungan dari pemerintah baik dari aspek permodalan, bantuan tenaga teknis, serta memfasilitasi pemasaran hasil akan memungkinkan masyarakat untuk giat mengembangkan usahanya sehingga mampu bersaing dalam skala lokal,

regional, maupun nasional, bahkan diharapkan mampu menembus pasar global (dunia).

(Wawancara 3 Agustus 2017)

Disisi lain Ibu anastasya yang juga selaku pedagang industri mengatakan bahwa :

Dengan semakin berkembangnya atau meningkatnya usaha industri kecil ini dapat meringkankan masyarakat dan membantu masyarakat untuk tetap bersemangat mengembangkan usahanya sehingga masyarakat tidak \kesulitan dalam membuka usahanya,dimana masyarakat sendiri pun mengetahui pemerintah sendiri yang turun tangan dan turut berpartisipasi dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya.

(Wawancara 4 Agustus 2017)

Hal yang senada juga di sampaikan oleh Ibu Siti fatimah yang juga selaku pedagang industri bahwa :

Disisi lain diketahui dimana peran pemerintah sangat aktif dalam mengembangkan usaha di kabupaten ini, selain memberikan modal pada masyarakat industri, pemerintah juga membina kemampuan masyarakat industri kecil sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha.

(Wawancara 10 Agustus 2017)

Hal in juga di kemukakan oleh Ibu Bergita selaku pedagang industri ketika ditanya mengenai manfaat yang di dapat dalam pelatihan ini bahwa :

Sangat terasa perbedaan ketika saya sebelum mengikuti pelatihan dengan sesudahnya. Banyak pengetahuan yang saya dapatkan misalnya, teknik pemasaran, ide-ide kreatif, pelayanan promosi dan penentuan target pembeli. Dan itu semua kami laksanakan di UKM, namun tetap kami sebagai pelaku UKM harus selalu berinovasi tidak terus menerus hanya ikut pelatihan, tetapi action yang terpenting bagaimana meningkatkan penjualan dan kualitas dari produk-produk yang kami jual.

(Wawancara 14 Agustus 2017)

3. Cara Kerja Teori

Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses. Suatu proses yangmelibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif,perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan

produk yang lebih baik identifikasi pasar pasar baru, dan transformasi pengetahuan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan.

B. Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan di atas serta disesuaikan dengan tujuan penelitian maupun kerangka konseptualnya maka di bahaslah hasil penelitian ini sebagai berikut.

Pertumbuhan jumlah UKM yang semakin hari kian melonjak pesat, mau tidak mau mendorong para pelakunya untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi pemasaran. Strategi pemasaran sering kali diibaratkan

sebagai jantung kehidupan sebuah usaha karena disini pelaku UKM harus melihat fokus dari usaha mereka. Pelaku UKM harus mampu melihat segmen pasar yang tepat untuk hasil produksi yang dimilikinya, pasar merupakan hal terpenting yang harus difikirkan oleh pemilik usaha. Penting bagi pemerintah untuk melakukan intervensi positif, profesional, dan proporsional dalam menciptakan sistem pemasaran bagi UKM.

Pelatihan yang diberikan tentunya memiliki manfaat, manfaat ini kemudian diharapkan oleh Dinas mampu betul-betul dirasakan oleh pelaku UKM kedepannya. Pada dasarnya, pelatihan sumberdaya memiliki beberapa manfaat yaitu :

- Membantu sumberdaya yang ada dalam organisasi itu untuk membuat keputusan dengan pemikiran yang jauh lebih baik dari sebelum melakukan pelatihan
- Meningkatkan kemampuan sumberdaya dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi organisasinya
- Timbulnya dorongan dalam diri setiap sumberdaya untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya
- Dengan meningkatnya kemampuan untuk mengatasi masalah yang ada, maka akan timbul rasa percaya diri dalam jiwa mereka
- Tersedianya informasi berbagai program yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pertumbuhan teknikal dan intelektual
- Meningkatnya kepuasan kerja
- Semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang
- Semakin besarnya tekak untuk mandiri
- Mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru dimasa depan

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam Perekonomian Indonesia, memainkan peran yang sangat berpotensi dalam meningkatkan pasokan baru serta persaingan, mengembangkan teknologi, menciptakan ragam pasar baru, meningkatkan kesempatan kerja dan hasil produksi. Perekonomian berbasis usaha mikro kecil dan menengah lebih baik karena usaha ini banyak menyerap tenaga kerja, modal yang relative kecil. Selain dari itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mampu meningkatkan daya kreativitas bagi masyarakat yang ingin memiliki penghasilan lebih sekaligus juga bisa menjadi ciri khas identitas suatu daerah dari hasil produksinya. Adanya perkembangan usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja dan pengurangan jumlah kemiskinan.

Tabel Daftar Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA PEMILIK / KONTAK PERSON	DESA / KELURAHAN	BENTUK BADAN USAHA	TAHUN DIKELUARKAN IZIN	
1	2	3	5	9	10	
1	KEL RANDEL	EMANUEL PAYONG	DESA PADA	PO	2002	INDUS
2	RIZELA	STANISLAUS SUNUR	LEWOLEBA BARAT	PO	2011	INDUS
3	BENGKEL ANNY	ANTONIUS NERO LIMAN	LEWOLEBA BARAT	PO	2010	INDUS
4	GRACIA	GABRIEL GALU	LEWOLEBA BARAT	PO	2011	INDUS
5	BENGKEL KAYU	BERGITA REBI	LEWOLEBA BARAT	PO	2008	INDUS
6	PENGELOHAN UBI	VERONIKA EBANG	LEWOLEBA BARAT	PO	2002	INDUS
7	MENJAHIT	MARIA BLIKON	LEWOLEBA BARAT	PO	2005	PENJA
8	MINYAK KELAPA	ELISABETH BUKA	LEWOLEBA BARAT	PO	2006	INDUS
9	MINYAK GORENG	MARIA SOMI	LEWOLEBA BARAT	PO	2005	INDUS

10	PENGGILINGAN PADI	BERNADUS TOBI ATUN	LEWOLEBA BARAT	PO	2005	INDUS
11	PENGGILINGAN PADI	PHILIPUS WITAK	LEWOLEBA BARAT	PO	2004	IN DU
12	TENUN IKAT	ELISABETH BATAFOR	LEWOLEBA BARAT	PO	1993	INDUS
13	BENGKEL KAYU	PIETER KLOBOR	LEWOLEBA BARAT	PO	2006	INDUS
14	PENGGILINGAN JAGUNG	GABRIEL BIE RADA	LEWOLEBA BARAT	PO	1993	INDUS
15	PENGGILINGAN PADI DAN JAGUNG	ALOWISIUS WURI	LEWOLEBA BARAT	PO	2006	INDUS
16	PENJAHIT ALO	JAFAR SAMIDA	LEWOLEBA	PO	2011	PENJA
17	BENGKEL LAS CINTA KARYA	PASKALIS SINA BISA LASAREN	LEWOLEBA	PO	2009	INDUS
18	SUMBER LEMBATA MEUBEL	HJ.NANONG DAENG SEBBE	LEWOLEBA	CV	2009	INDUS
19	KARTIKA MEUBEL	SOETRISNO	LEWOLEBA	PO	2004	INDSU
20	TITO INDUSTRI	MARIA PUKAN KOBUN	LEWOLEBA	PO	2004	INDUS
21	SANGGAR KARYA PRODUKTIF	YOSEPH KODA BLIKOLOLON	LEWOLEBA	CV	2002	INDUS
22	TANJUNG NAGA	EGIDIUS BERANI	LEWOLEBA	PO	2002	PENJA
23	AQUA FRESH	ANTONIUS YUNIOR	LEWOLEBA	PO	2009	INDUS
24	LEMBATA INDAH	GRACE CHANDRA	LEWOLEBA	PO	2009	INDUS
25	AMANAH FUNITUR	AHMAD HUSEIN	LEWOLEBA	PO	2008	INDUS
26	MITRA FOTOCOPY	MUNIR	LEWOLEBA	PO	2006	INDUS
27	BERDIKARI TAYLOR	VALENTINUS AKOIT	LEWOLEBA	PO	2007	PENJA
28	PENGOLAHAN KUE	YOSEVINA BALAGOGE	LEWOLEBA	PO	2007	INDUS
29	BUMI RAYA	TOMI SILIMALAR	LEWOLEBA	PO	2005	INDSU
30	EFRATA KARYA	PALMASIUS GOKOK	LEWOLEBA	PO	2007	INDUS
31	PENJAHIT HIDAYAH	USMAN LA ASIMU	LEWOLEBA UTARA	PO	2001	PENJA
32	PENJAHIT MANDAR	ARIFUDIN	LEWOLEBA UTARA	PO	2001	PENJA
33	PENJAHIT PESONA	M.SAID	LEWOLEBA UTARA	PO	2001	PENJA
34	PENJAHIT ALLO	JAFAR	LEWOLEBA UTARA	PO	2006	PENJA
35	EMA MADJID OIL	EMA MADJID	LEWOLEBA UTARA	PO	2001	INDUS
36	SALMA OIL	SALMA	LEWOLEBA UTARA	PO	2001	INDUS
37	AISA LATIF OIL	AISA LATIF	LEWOLEBA UTARA	PO	2001	INDUS
38	SATWALANG OLI	SATWALANG	LEWOLEBA UTARA	PO	2001	INDUS
39	SGB OIL	FATIMA BOLI	LEWOLEBA UTARA	PO	2001	INDUS
40	MEKAR MULYA	ALI MUNTAHA	SELANDORO	PO	2011	INDUS
41	TIAN PUTRA PRATAMA	IGNASIUS SILI PURAB,ST	SELANDORO	CV	2011	PENJA
42	HORISSON FRESH	JUANITA JUA LEMBANG	SELANDORO	PO	2011	INDUS
43	MUSTIKA	NURLIN HASAN	SELANDORO	PO	2010	INDUS

44	RAFIT MEUBEL	ABDUL RAHMAN SODIQ	SELANDORO	PO	2005	INDUS
45	TUTO MURIN	PETRUS MUDA PUE	SELANDORO	PO	2014	INDUS
46	MINDA WATER STERILL	ALIM KADIR	SELANDORO	PO	2006	INDUS
47	BENGKEL LAS	HENDRA WIYONO	SELANDORO	PO	2006	INDUS
48	PENJAHIT LAMAHOLOT	ARIFIN LAMAHODA	SELANDORO	PO	2006	PENJA
49	WIRA KARYA	YANTO BIN AHMADAP	SELANDORO	PO	2007	INDUS
50	TITE HENA	ISKANDAR RATULELA	SELANDORO	PO	2010	INDUS
51	MAURA FOTOCOPY	TINCE DIARO	SELANDORO	PO	2012	INDUS
52	KARYA LELUHUR	TUA BONDA AP	SELANDORO	PO	2010	INDUS
53	KANAAN	HENGK,I ST	LEWOLEBA TIMUR	PO	2010	INDUS
54	WATER FRESH	LODORIKUD LEDON ATARODANG	LEWOLEBA TIMUR	PO	2013	INDUS
55	LEMBATA INDAH II	GRACE CHANDRA	LEWOLEBA TIMUR	CV	2007	INDUS
56	AQUALINDO	LAMBERTUS ERAP	LEWOLEBA TIMUR	PO	2004	INDUS
57	PEMBUATAN TEMPE TAHU	ISMULYONO	LEWOLEBA TIMUR	PO	2005	INDUS
58	GLORY BAKERY	AGUSTINA NARIMA RAHAYU	LEWOLEBA TIMUR	PO	2006	INDUS
59	PEMBUATAN KASUR	YULIANA BOKILIA	LEWOLEBA	PO	1997	INDUS
60	SEDANG MEKAR	YULIANA BOKILIA	LEWOLEBA	PO	2004	INDUS
61	PENGGILINGAN JAGUNG	BENEDIKTUS MAMUT	LEWOLEBA	PO	2002	INDUS
62	BENGKEL LAS PUTRA FLORES	ABDUL RASYID D.P	LEWOLEBA	PO	2005	INDUS
63	FURNITUR KAYU	VEBRUS J.RATU	LEWOLEBA SELATAN	PO	2008	INDUS
64	FORMIGA	ANASTASIA NOGO.W	LEWOLEBA TENGAH	CV	2005	REPR
65	STELLA MARIS	HIRONIMUS MORON	LEWOLEBA TENGAH	PO	2005	INDUS
66	SURYA LEMBATA	DRS.STANIS,T.ATAWOLO	LEWOLEBA TENGAH	PO	2010	INDUS
67	JEPARA MEUBEL	MUHAMMAD ASRO	LEWOLEBA TENGAH	PO	2010	INDUS
68	AQUANDA	PETRUS BOLI KERAF	LEWOLEBA TENGAH	PO	2008	INDUS
69	MERCURI	IMRAN AMIRAN DAUD	LEWOLEBA TENGAH	PO	2004	INDUS
70	AQUANDA	PITER KERAF	LEWOLEBA TENGAH	PO	2005	INDUS
71	FREDY TAILOR	FRANSISKUS	LEWOLEBA	PO	2002	PENJA

			TENGAH			
72	MEKAR MELATI	MARSELINA TOLOK	LEWOLEBA TENGAH	PO	2002	INDUS
73	ARKUS PUTERA	SIPRIANUS B ELLAN	LEWOLEBA TENGAH	PO	2002	INDUS
74	MERPATI	ISMAIL HJ.TAHER	LEWOLEBA TENGAH	PO	2003	INDUS
75	DEPOT AIR DIRHAM	ABDUL RAHMAN LANGODAY	SELANDORO	PO	2001	INDUS
76	WAV FOTOCOPY	KONRADUS LABA	LEWOLEBA TENGAH	PO	2001	INDUS
77	FORTUNA	GABRIEL MATHEUS L. BENIDAU	LEWOLEBA TENGAH	PO	2001	INDUS
78	BINA LESTARI	RIZHARD A NDOLU	LEWOLEBA TENGAH	PO	2004	INDUS
79	ARNOLDUS NUSA INDAH	YOSEPHINA S.KERONG	LEWOLEBA UTARA	PT	2004	INDUS
80	ALAM FANA	MUHAMMAD HJ.KEDDE	LEWOLEBA UTARA	CV	2003	INDUS
81	ALOR MANDIRI	HALIJA NUR,ST	LEWOLEBA UTARA	CV	2003	INDUS
82	DWI KUMALA BUMI	IDRUS NUR	LEWOLEBA UTARA	PT	2003	INDUS
83	GELEKAT LEWO	GASPAR DONI IKENG	LEWOLEBA UTARA	CV	2002	INDUS
84	UD.SEMBUR PAUS	HERMAN B. BATAONA	LEWOLEBA UTARA	PO	2009	PENJA
85	AKBAR	RIFAY ALI	LEWOLEBA UTARA	CV	2002	PENJA
86	PENJAHIT ANDA	BAMBANG ASKAR	LEWOLEBA UTARA	PO	2004	INDUS
87	PEMBUATAN KUE	LARSI HARBINI	LEWOLEBA UTARA	PO	2001	INDUS
88	PEMBUATAN TEMPE TAHU	SUKINO	LEWOLEBA UTARA	PO	2001	INDUS
89	PEMBUATAN KUE	SITI MAIMUNA	LEWOLEBA UTARA	PO	2000	INDUS
90	TENUN IKAT LEREK	YULIANA KOBAN	LEWOLEBA TIMUR	PO	2005	INDUS
91	ATAKORE	AMANDA	SELANDORO	PO	2008	I NDU
92	SMK ILE LEWOTOLOK	FERDINANDUS KODA, SE	SELANDORO	PO	2002	INDUS
93	TRI KARYA FUNITUR	NASIR	LEWOLEBA UTARA	PO	2000	INDUS
94	PETEN RIBU	ANDREAS D BETEKENENG	SELANDORO	PO	2008	INDUS
95	KARYA PUTRA JEPARA	AMALUDIN LEGA	LEWOLEBA TIMUR	PO	2007	INDUS
96	PURA KOTA SARE	GABRIEL	LEWOLEBA TIMUR	PO	2005	INDUS
97	BAMBU GROUP M1I	SERVAS LADOANGIN	LEWOLEBA TIMUR	PO	2004	INDUS
98	VAUSTINA MEBEL	DIRI YEREMIASTUKAN	SELANDORO	PO	2005	INDUS
99	JAILANI FOTOCOPY	UMAR JAILANI	SELANDORO	PO	2007	INDUS

100	MEKO REMO FUNITUR	YUVEN SEDA	LEWOLEBA TIMUR	PO	2006	INDUS
101	DESANTOS FOTOCOPY	BERNAD ADO ASAN	LEWOLEBA TIMUR	PO	2007	INDUS
102	MITRA FOTOCOPY	FARID	LEWOLEBA TIMUR	PO	2006	INDUS
103	SINAR AKE LOHE 1	ROSA NOGO TUKAN	LEWOLEBA TIMUR	PO	2002	INDUS
104	SINAR AKE LOHE II	PANKRASIUS LANGODAY	LEWOLEBA TIMUR	PO	2002	INDUS
105	INDUSTRI TEMPE	MARIA MONIKA MUDE	LEWOLEBA TIMUR	PO	2003	INDUS
106	WAIKRATA FUNITUR	YUFENSIUS B.SEDA	LEWOLEBA TIMUR	PO	2006	INDUS
107	WAIKRATA FUNITUR	LAURENSIUS DUA	LEWOLEBA TIMUR	PO	2005	INDSU
108	PUPU SANTA	RAENELDIS EMA	LEWOLEBA SELATAN	PO	2005	INDUS
109	DEPOT AIR MAHKOTA	DJONI	SELANDORO	PO	2014	INDUS
110	DEPOT AIR TUJUH RODA	VERONIKA DHOLO	LEWOLEBA TIMUR	PO	2014	INDUS
111	DEPOT AIR ELWIN FRESH	YOSEPH KAPISTIANO BEKA LAJAR	LEWOLEBA UTARA	PO	2014	INDUS
112	DEPOT AIR AQUANAS	STANISLAUS LENGARI	LEWOLEBA	PO	2014	INDUS
113	DEPOT AIR EVINSA	STURMINUS ELAMAN	LEWOLEBA SELATAN	PO	2014	INDUS
114	DEPOT AIR GIOK	A.F.AYUMUIS LAMANIPA	PADA	PO	2014	INDUS
115	DEPOT AIR LATANSA BIMA	JAHARUDIN A.KAHAR	PADA	PO	2014	INDUS
116	DEPOT AIR LILICA FRES	CINDI CLAUDIA WIJAYA	LEWOLEBA	PO	2014	INDUS
117	MERPATI	HJ,ISMAIL TAHER	LEWOLEBA TENGAH	CV	2013	INDUS
118	AL AMIN DEPOT	ABDUL RASYID BETHAN	SELANDORO	PO	2014	INDUS
119	PENJAHIT	FRAUSINA	LEWOLEBA BARAT	PO	2003	PENJA
	JUMLAH	121				

Di Kabupaten Lembata, kelompok usaha yang mempunyai peranan terbesar pada sektor usaha adalah kelompok industri furniture dari kayu, industri air minum, pakaian, percetakan. Dimana rata-rata usaha yang ada di kabupaten Lembata rata-rata bergerak di kedua kelompok ini, mulai dari usaha kecil, sampai dengan besar.

Kabupaten Lembata merupakan daerah otonomi baru. Pada era otonomi daerah saat ini mewujudkan pembangunan nasional pada bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah . Dengan adanya UUD Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam membangun potensi daerahnya. Diperlukan upaya yang lebih inovatif dan kreatif oleh pemerintah daerah khususnya kelembagaan pemerintah daerah di Kabupaten Lembata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya secara merata.

Usaha kecil merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat perannya dalam pembangunan, usaha kecil harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan , saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha yang kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM serta masyarakat harus bekerja sama. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan Dinas Koperasi dan UKM berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, membina, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Otonomi Daerah Sebagai Kemajuan Ekonomi Masyarakat Industri Kecil di Kabupaten Lembata sudah cukup baik, pembinaan UKM yang selama ini berbentuk pelatihan bimbingan teknis sudah memberikan efek positif bagi beberapa pelaku UKM, walaupun belum semua UKM mampu mengimplementasikan apa yang sudah diberikan saat pelatihan dan pembinaan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

Lembata. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lembata memiliki nilai lebih dalam strategi ini. Ciri strategi yang mengedepankan keunikan/kekhasan produk dalam pasar yang jadi sasarannya.

2. Untuk kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berada di Kabupaten Lembata, setiap tahunnya mengalami peningkatan baik dari segi pendapatan pemilik maupun karyawannya, hal ini disebabkan oleh bertambahnya minat masyarakat untuk membeli produk yang dijual oleh usaha tersebut sehingga memberikan kontribusi positif bagi para pelaku UKM, selain itu peran dari pemerintah pun ikut membangun perkembangan UKM yang ada sehingga UKM di Kabupaten Lembata berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih sejahtera.

B. SARAN

1. Sampai saat ini peran pemerintah dalam membantu perkembangan UKM yang ada dirasa sudah cukup membantu perkembangan UKM yang ada dengan program pemberian alih teknologi UKM namun diharapkan lebih banyak lagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat membantu pertumbuhan UKM daerah sehingga produk mereka bisa bersaing di pasar global dengan cara lebih rutin lagi mengadakan penyuluhan tentang manajemen keuangan, pengolahan usaha, serta memberikan dukungan materil kepada UKM yang sedang berkembang.

2. UKM di Kabupaten Lembata berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih sejahtera untuk itu pemerintah harus mempertahankan UKM yang telah berkembang di kabupaten Lembata sehingga jumlah UKM semakin meningkat dan berkembang di setiap tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly (2000). *Otonomi Daerah dan Peluang investasi, Makalah dalam 'Government Convergence' tentang " Peluang investasi dan Otonomi daerah"*, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2008). *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, [Http://www.Bappenas.Go.id/node/123/3/uu-no32-tahun2004-tentang-pemerintahan-daerah/](http://www.Bappenas.Go.id/node/123/3/uu-no32-tahun2004-tentang-pemerintahan-daerah/) diakses pada tanggal 25 juni 2017*
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2008). *Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, [Http://www.Bappenas.Go.id/node/123/3/uu-no33-tahun2004-tentang-pemerintahan-daerah/](http://www.Bappenas.Go.id/node/123/3/uu-no33-tahun2004-tentang-pemerintahan-daerah/) diakses pada tanggal 25 juni 2017*

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lembata tentang Perkembangan UKM pada tahun 20014

Departemen Koperasi (2008). *PDB, Investasi, Tenaga kerja, Nilai ekspor UKM di Indonesia*. Depkop. Jakarta.

Haeruman, H., (2000). *Peningkatan Daya Saing Industri Kecil untuk mendukung Program PEL, Makalah Seminar Peningkatan Daya Saing, Graha Suci Findo, Jakarta.*

Hanum, Wirda. (2010). *Analisis Pengaruh Perkembangan Industri UKM terhadap Pertumbuhan Sektor Industri Sumatera Utara (Skripsi)*. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.

Ikhsan, M. (2004). *Mengembalikan Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam Jangka Menengah: Peran Usaha Kecil dan Menengah. Jurnal Analisis Sosial 9 (2): 1-31* Jafar, Mohammad Hafsa. 2004. ‘ ‘ *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*’, *Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004.*

Kuncoro, M., (2002) *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia, UPP AMP YKPM, Yogyakarta.*

Kuncoro, M dan PT Asanah Wirasta Setia. (1997), *Pengembangan Pola Pembinaan Usaha Kecil dan Masyarakat di Sekitar Obyek dan kawasan Pariwisata, PT Asanah Wirasta Setia dan Deparpostel, Yogyakarta.*

Lubis, S.B.Hari., (1986). *Manajemen Usaha Kecil, Diktat Kuliah : Program Magister Teknik dan Manajemen Industri, ITB. Muhandri, T., 2002, Karakteristik Produk Pangan yang Sesuai untuk Industri Kecil, Tesis Magister Program Studi Teknik dan Manajemen Industri, ITB.*

Manan, Bagir, *Hubungan Pusat Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Seminar Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Hata Internasional Legal Counsellors, Jakarta, 20 Juli 1999.*

Pardede, F.R., 2000, *Analisis Kebijakan Pengembangan Industri Kecil di Indonesia, Tesis Magister Program Studi Teknik dan Manajemen Industri, ITB.*

Partomo, T. dan A. Soejodono .(2004). *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi. Ghalia, Jakarta.*

- Salim, Emil, *Otonomi Daerah Dan Masalahnya Dalam Buku Harian Suara Pembaruan, Otonomi atau Feralisme Dampaknya Terhadap Perekonomian, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.*
- Sukirno, Sadono. (2007). *Ekonomi Pembangunan (Proses, masalah, dan kebijakan).* Jakarta: Kencana Prenada.
- Sulekale Daniel Dalle, 2003, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah*, *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Artikel Th II-No.2-April 2000.
- Suryana. (2000). *Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi, Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan.* UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus. (2002). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting.* Jakarta: Salemba Empat.
- Tejasari, Maharani. (2008). *Peranan Sektor Usaha Kecil dan Menengah dalam penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi (Skripsi).* Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Tjahja Muhandri , 2002, *Strategi Penciptaan Wirausaha (Pengusaha) Kecil Menengah Yang Tangguh, Makalah Falsafah Sains Program Pasca Sarjana / S3, IPB.*
- Widya A, Santikajaya. (2006). *Analisis Dampak Perkembangan Usaha Kecil Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia: Metode Data Panel Tahun 1998-2004.* Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

1. Bagaimana perkembangan Industri Kecil di Kabupaten Lembata setelah Otonomi Daerah ?
2. Sejauh mana peran pemerintah daerah dalam mengembangkan Industri Kecil di Kabupaten Lembata ?
3. Langkah apa saja yang diambil pemerintah untuk meningkatkan Industri Kecil di Kabupaten Lembata setelah Otonomi Daerah ?
4. Usaha-usaha apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan Industri Kecil di Kabupaten Lembata ?
5. Bagaimana upaya pemerintah untuk melaksanakan Industri Kecil di Kabupaten Lembata ?
6. Bagaimana cara pemerintah meningkatkan usaha Industri Kecil yang ada di Kabupaten Lembata ?
7. Apakah dengan adanya Otonomi Daerah di Kabupaten Lembata dapat membantu usaha Industri Kecil masyarakat Lembata?
8. Manfaat apa saja yang di dapat dari pelatihan yang diberikan oleh pemerintah ?

Daftar Nama-Nama informan

1. Nama : Drs. Bernadus Boli Hipir
Umur : 54 tahun
Pekerjaan : Kepala Koprindag
2. Nama : Drs. Benediktus Making
Umur : 57 tahun
Pekerjaan : Sekertaris Koprindag
3. Nama : Lusiana Buke S.sos
Umur : 47 tahun
Pekerjaan : Staf Koprindag
4. Nama : Yoanis Lalang St.
Umur : 39 tahun
Pekerjaan : Staf Koprindag
5. Nama : Cristine Agustina
Umur : 36 tahun
Pekerjaan : Staf Koprindag
6. Nama : Yuliana
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Staf Koprindag
7. Nama : Maria Wutun
Umur : 65 tahun
Pekerjaan : Pedagang Industri Tenun Ikat
8. Nama : Anastasya
Umur : 42 tahun
Pekerjaan : Pedagang Industri Tenun Ikat
9. Nama : Siti Fatimah
Umur : 54 tahun

Pekerjaan : Pedagang Industri Tenun Ikat

10. Nama : Bergita

Umur : 47 tahun

Pekerjaan : Pedagang Industri Tenun Ikat

Foto bersama staf koprindag selesai wawancara



FOTO BERSAMA PENGELOLA DAN PEDAGANG
INDUSTRI TENUN IKAT









RIWAYAT HIDUP



Siti Syamsia. Lahir di Lewoleba Lembata, pada tanggal 8 April 1995. Anak ke tiga dari enam bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Muhammad Ikram Jafar dan Siti Habibah

Ratuloly. Penulis menempuh Sekolah Dasar di SD Inpres Lewoleba II mulai tahun 2001 sampai tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTSN Nubatukan dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Nubatukan dan tamat tahun 2013.

Kemudian pada tahun 2013 penulis berhasil lulus pada jurusan pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar program strata 1 (S1) kependidikan.